



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR: SK.102/PS.302/ITJEN-2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam rangka harmonisasi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Rencana Strategis Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Jenderal merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal;
2. Arah Kebijakan dan Strategi;
3. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Indikator dan Target Kinerja serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal; dan
4. Lampiran yang terdiri dari Matriks Kinerja, Matrik Daftar Proyek Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dan Kerangka Pendanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA: ...

KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
2. Acuan dalam penyusunan Peta Strategi Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
3. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
4. Evaluasi Kinerja Pengawasan; dan
5. Laporan Akuntabilitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Renstra Unit Kerja Eselon II ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Inspektur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

- KELIMA** : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dapat dilakukan kaji ulang dan evaluasi yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintahan.
- KEENAM** : Lampiran Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

pada tanggal : 17- DESEMBER -2020

INSPEKTUR JENDERAL,



GEDE PASEK SUARDIKA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENHUB

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

Profesional - Integritas - Amanah



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 telah selesai disusun.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Tahapan penyusunan maupun sistematika penulisan dokumen Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan dibidang pengawasan transportasi sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), muatan kebijakan dan rencana aksi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini diharapkan dapat menjawab sejumlah Rencana Strategis di bidang transportasi dalam 5 tahun kedepan.

Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini, diharapkan kepada seluruh jajaran Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar mengacu kepada dokumen Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini.



Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ini. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dokumen Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai target dan membawa manfaat terhadap pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 17 Desember 2020

INSPEKTUR JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Pengertian Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	2
1.1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.....	2
1.1.4. Posisi dan Fungsi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	4
1.2. EVALUASI RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019.....	5
1.2.1. Perbandingan Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran	5
1.2.2. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	6
1.2.3. Permasalahan Pelaksanaan Renstra 2015-2019	8
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	9
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1. VISI	12
2.1.1. Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024	12
2.1.2. Visi Inspektorat Jenderal 2020-2024	12
2.2. MISI	13
2.2.1. Misi Kementerian Perhubungan 2020-2024	13
2.2.2. Misi Inspektorat Jenderal 2020-2024.....	14
2.3. TUJUAN.....	15
2.3.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2020-2024	15
2.3.2. Tujuan Inspektorat Jenderal 2020-2024	15
2.4. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024	16
2.4.2. Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2020-2024	17
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	29
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional	29
3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan	30
3.1.3. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal	34
3.1.4. Tujuan Kebijakan Pengawasan Intern.....	39
3.2. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN.....	40
3.3. KERANGKA REGULASI BIDANG PENGAWASAN 2020-2024	43
3.3.1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan	43
3.3.2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan	44
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN 2020-2024	46
3.4.1. Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Pengawasan 2020-2024.....	46
3.4.2. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan.....	48
3.4.3. Road Map Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal	49
3.4.4. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan <i>Technology Savvy</i>	53
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	59
4.1. TARGET KINERJA 2020-2024.....	59
4.1.1. Indikator Kinerja Program.....	59
4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan	60
4.1.3. Target Kinerja	61
4.2. KERANGKA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2020-2024	64
BAB 5 PENUTUP.....	70
5.1. KESIMPULAN	70
5.2. ARAHAN PIMPINAN	70
5.3. MEKANISME EVALUASI	71



DAFTAR GAMBAR

BAB 1

Gambar 1.1. Matrik Analisis SWOT Inspektorat Jenderal..	11
---	----

BAB 2

Gambar 2.1. Strategy Map Kementerian Perhubungan.	17
Gambar 2.2. Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.3. Strategy Map Inspektorat Jenderal.	24

BAB 3

Gambar 3.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal	38
Gambar 3.2. Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal.	39
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	46
Gambar 3.4. Sebaran Objek Audit	47
Gambar 3.5. Jumlah Objek Audit.	47
Gambar 3.6. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	48

DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel 1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	3
--	---

BAB 2

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, IKSS dan Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.2. Langkah Konkrit Pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dalam Program Pengawasan Inspektorat Jenderal Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.3. Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Meta Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.....	25

BAB 3

Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	30
Tabel 3.2. Pembagian Kelompok Substansi	51
Tabel 3.3. Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.....	54



BAB 4

Tabel 4.1. Kinerja Program.....	59
Tabel 4.2. Kinerja Kegiatan	60
Tabel 4.3. Target Sasaran Program Pengawasan.....	62
Tabel 4.4. Target Sasaran Kegiatan Pengawasan	63
Tabel 4.5. Matrik Semula-Menjadi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Itjen.....	66
Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2020-2024.....	68

DAFTAR GRAFIK

BAB 1

Grafik 1.1. Perbandingan Rencana, Alokasi dan Penyerapan APBN Inspektorat Jenderal 2015-2019.....	5
Grafik 1.2. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2015-2016.....	6
Grafik 1.3. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2017-2018.....	7
Grafik 1.4. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2019.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kegiatan Prioritas Strategis Nasional di Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	
Lampiran 2. Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	
Lampiran 3. Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal 2020-2024	
Lampiran 4. Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	
Lampiran 5. Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Kuatnya dorongan arus reformasi dan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), APIP menjadi sangat penting berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif, dengan melakukan tindakan preventif dalam mencegah kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020.

Selama kurun waktu 2015-2019 Inspektorat Jenderal telah mengimplementasikan fungsi pengawasan dalam berbagai sasaran program prioritas antara lain peningkatan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dengan mewujudkan



kapabilitas tata Kelola pengawasan intern. Memasuki periode 2020-2024 Inspektorat Jenderal fokus terhadap peningkatan kualitas pengawasan sebagai salah satu program prioritas yang dititik beratkan kepada *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat dengan mempertimbangkan perkembangan global terkait kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosannya yang dapat mempengaruhi sektor transportasi.

1.1.2. Pengertian Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah:

- Dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahunan atau periode 2020-2024 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai unsur yang melaksanakan fungsi pengawasan Intern berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Berisi visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di bidang transportasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024.

1.1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Sebagaimana didefinisikan pada sub bab 1.1.2, maka pengawasan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 dengan mengacu pada kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sesuai **Tabel 1.1**.



Tabel 1.1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 122 TAHUN 2018
1	Kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2	Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sumber : pasal 670, 671, dan 672 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub.

Berdasarkan pasal 671 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang dirangkum pada Tabel 1.1 di atas, maka ruang lingkup pengawasan terbagi pada masing-masing Inspektorat atau unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan landasan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan lainnya yang lebih rendah sebagai pelaksanaannya.

1.1.4. Posisi dan Fungsi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 dapat diartikan sebagai rumusan rencana aksi (berisi sasaran dan target kinerja serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan) untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, maka Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 juga merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 terutama dalam menjalankan program peningkatan pengawasan dan pengendalian. Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

1. Pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan selama 5 tahun ke depan (2020-2024);
2. Penyusunan Renstra 2020-2024 Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), antara lain dokumen Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), Penetapan Kinerja (PK) dan reviu-nya, Rencana Aksi Atas PK, serta LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Inspektorat Jenderal selama periode 2020-2024.



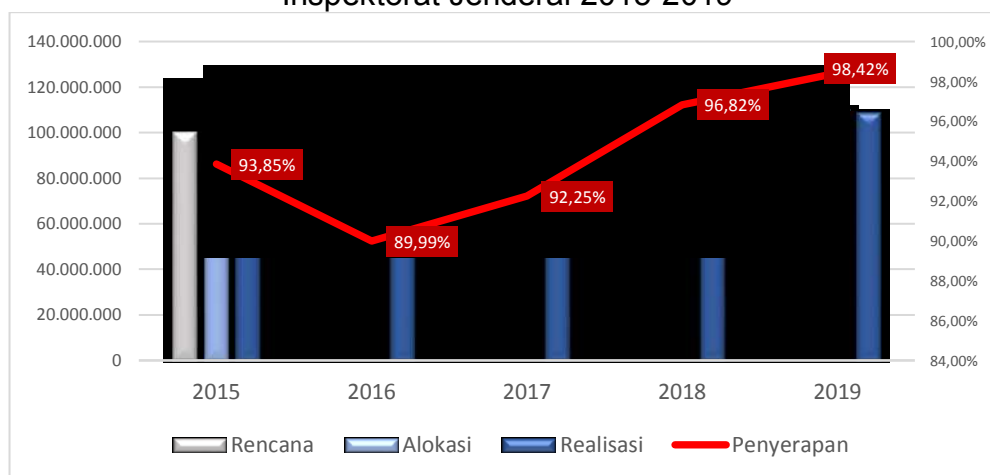
1.2. EVALUASI RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019

1.2.1. Perbandingan Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Berdasarkan capaian terhadap rencana, alokasi dan penyerapan anggaran selama periode 2015-2019 sesuai **Grafik 1.1** menunjukkan bahwa Rencana Kebutuhan APBN untuk penyelenggaraan program pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dokumen Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 sebesar Rp552,31 Milyar, pada pelaksanaannya alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp507,12 Milyar (atau sekitar 91,82% dari rencana kebutuhan). Dalam hal ini alokasi anggaran Tahun 2015 sama dengan rencana dikarenakan proses perencanaan anggaran pada Tahun 2015 bersamaan dengan waktu penetapan dokumen Renstra (sekitar akhir tahun 2015).

Grafik 1.1

Perbandingan Rencana, Alokasi dan Penyerapan APBN
Inspektorat Jenderal 2015-2019



Sumber:

- Renstra & Reviu Inspektorat Jenderal 2015-2019
- LAKIP Inspektorat Jenderal 2015 s.d. 2019

Secara umum kemampuan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam melakukan penyerapan anggaran relatif cukup tinggi (di atas 90%), kecuali pada tahun 2016 daya serap Inspektorat Jenderal sebesar 89,99%, hal ini disebabkan tidak terserapnya belanja pegawai karena Inspektorat Jenderal direncanakan akan mendapat tambahan pegawai (CPNS) lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebanyak 100 orang namun tidak dapat terealisasi.



1.2.2. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal

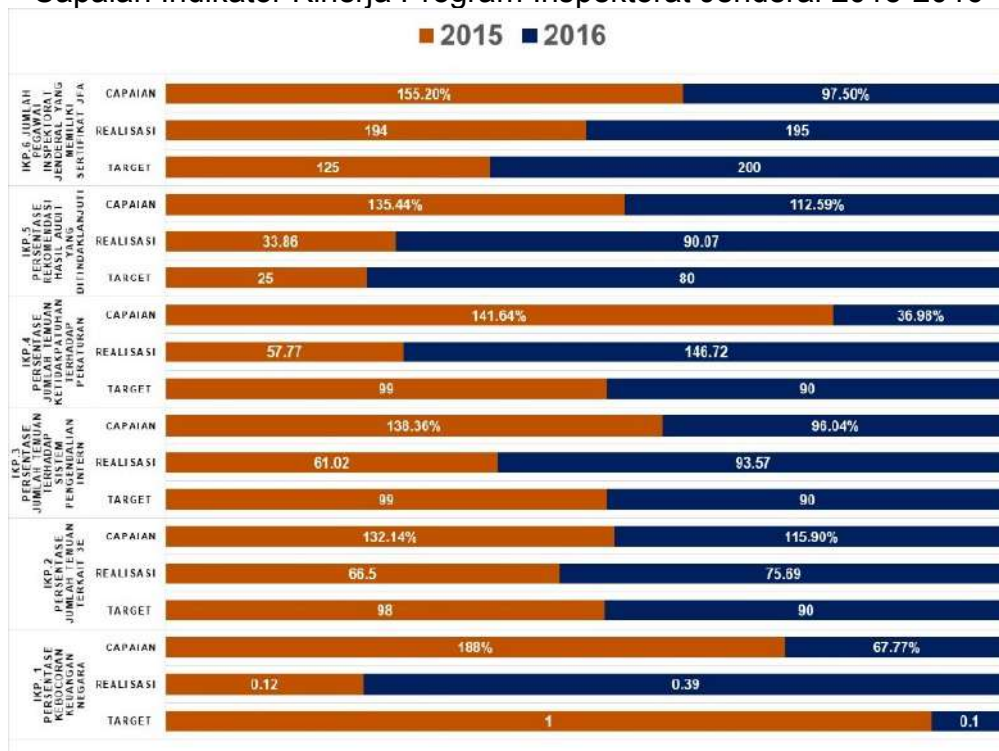
Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal 2015-2019 yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Program (IKP) yang ditetapkan.

Terdapat 3 rumusan SP dan IKP Inspektorat Jenderal selama periode 2015-2019, lebih lanjut perubahan serta capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sesuai dengan rumusan awal dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 yang ditetapkan pada Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/INSPEKTORAT JENDERAL-2015 yang terealisasi selama tahun 2015 dan 2016 disajikan pada **Grafik 1.2** berikut:

Grafik 1.2

Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2015-2016

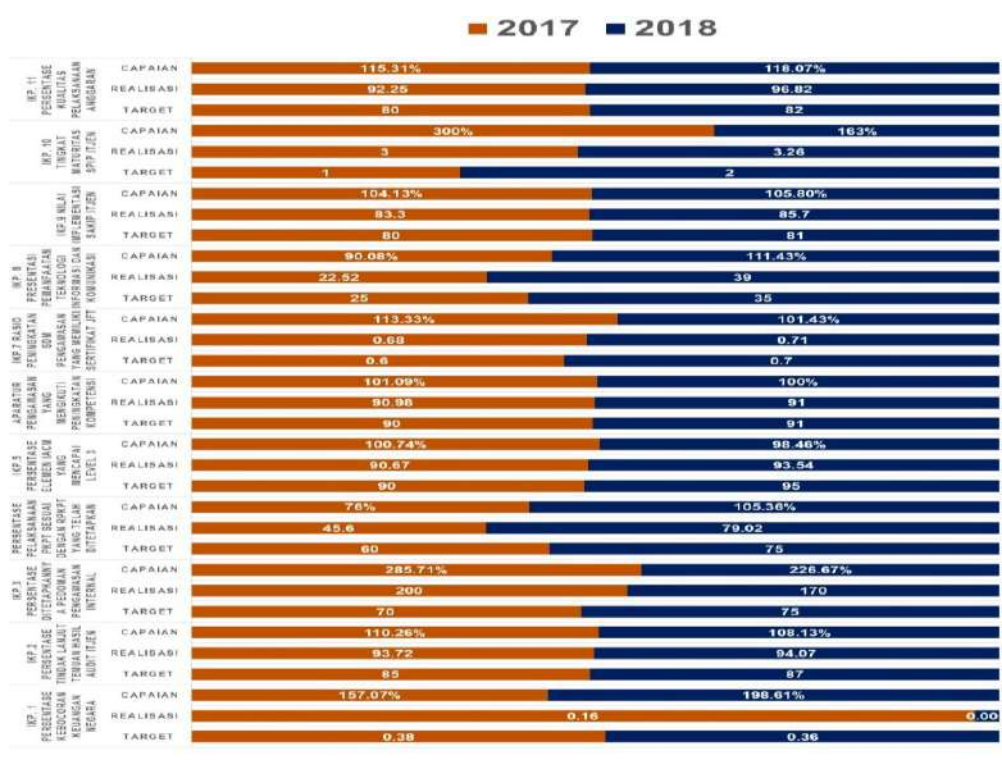


2. Rumusan SP dan IKP serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal yang kedua sesuai dengan **Grafik 1.3** adalah rumusan perubahan SP dan IKP berdasarkan hasil revidi Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2017.



Grafik 1.3

Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2017-2018

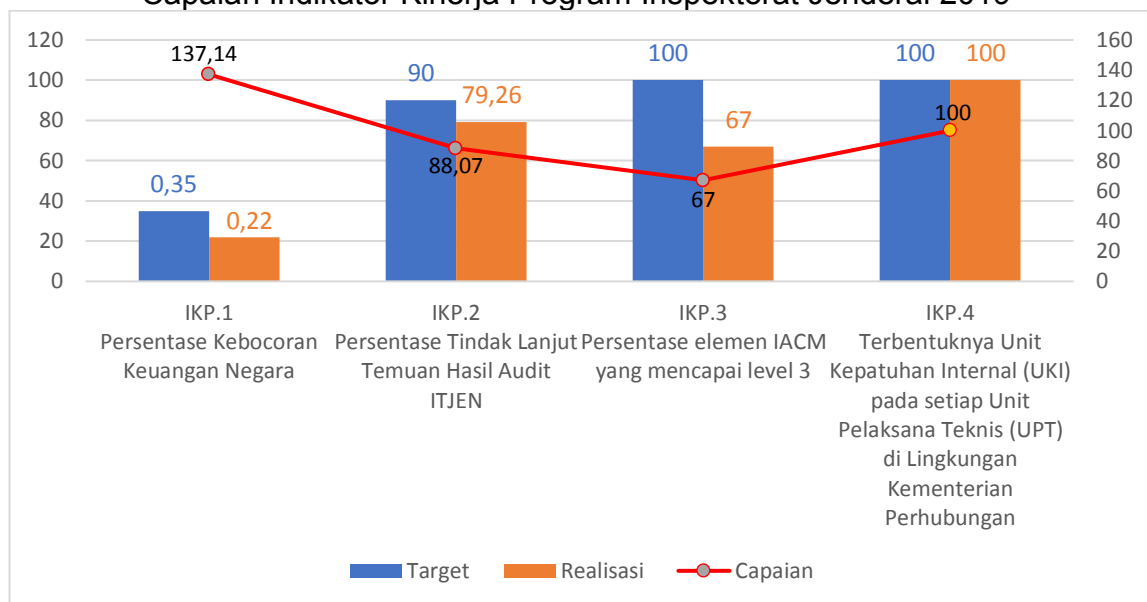


Reviu Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2017 disusun untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, perubahan tersebut meliputi beberapa rencana aksi dalam membenahi infrastruktur pengawasan untuk peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Rumusan SP dan IKP serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal yang ketiga sesuai dengan **Grafik 1.4** adalah rumusan perubahan SP dan IKP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) Nomor B/640/M.AA.05/2018 bahwa IKP Inspektorat Jenderal yang belum berorientasi hasil atau output diturunkan kepada unit dibawahnya/Eselon II, sehingga IKP Renstra Inspektorat Jenderal berubah dari 11 IKP (reviu Renstra Inspektorat Jenderal 2017) menjadi 3 IKP.



Grafik 1.4
Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2019



Dari 3 IKP berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat penambahan **1 IKP**, sehingga pada tahun 2019 total menjadi 4 IKP.

1.2.3. Permasalahan Pelaksanaan Renstra 2015-2019

Beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target kinerja terkait Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 disebabkan adanya perubahan nomenklatur terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal berdasarkan PM. 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu yang semula Inspektorat Jenderal memiliki unit tersendiri dalam melaksanakan fungsi tindak lanjut hasil audit kemudian dialihkan kepada masing-masing Inspektorat wilayah, yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dikarenakan Inspektorat Jenderal masih terfokus kepada penataan kinerja internal, sehingga peran Inspektorat Jenderal sebagai *consulting partner* belum dirasakan seutuhnya oleh auditi atau mitra kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;



2. *Internal Audit Capability Model* (IACM) atau juga yang disebut dengan model kapabilitas audit intern adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah. Pada tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan masuk kedalam kategori level 3 dengan catatan atau sebesar **67%** yang dihitung berdasarkan perbandingan antara total pemenuhan pernyataan pada level 3 dibagi dengan jumlah total pernyataan. Hal ini disebabkan karena beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPKP untuk mencapai level 3 penuh (100%) belum dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yaitu pemenuhan Kendali Mutu Audit (KMA) belum diimplementasikan secara optimal dalam kegiatan pengawasan;
3. Pengembangan profesi dan perolehan angka kredit jabatan fungsional auditor belum terlaksana dengan maksimal;
4. Kurangnya kompetensi teknis SDM aparat pengawas Inspektorat Jenderal, khususnya sertifikasi keahlian yang harus dimiliki terkait pemeriksaan internal sektor transportasi;
5. Belum adanya pembaharuan pedoman peraturan tentang perjalanan dinas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
6. Belum adanya pedoman terkait pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan Teknologi Informasi.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dipandang dari sudut manajemen, pengawasan merupakan salah satu dari rangkaian proses dalam fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Pengawasan internal memegang peranan yang sangat penting bagi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara profesional dan mandiri (*independen*) akan menjamin



terlaksananya seluruh proses manajemen di dalam organisasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku serta akan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Saat ini paradigma fungsi pengawasan telah bergeser ke arah *quality assurance* dan *consulting*, pergeseran tersebut terjadi tanpa meninggalkan aktivitas *watchdog*. Dengan paradigma baru tersebut, peran APIP dituntut untuk menjadi mitra kerja manajemen yang proaktif dan berorientasi pada hasil strategik yang dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, pelaksanaan tugas-tugas pengawasan harus senantiasa memperhatikan mutu audit yang lebih mengutamakan langkah pencegahan (*preventif audit*) melalui deteksi dini dan penangkalan, serta mendorong proses perbaikan manajemen guna memaksimalkan kinerja auditi.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi serta fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal perlu menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor* = CFS) yang sesuai dengan kondisi saat ini. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan visi dan misi dengan menggunakan metode analisis SWOT yang mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*).

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal berorientasi kepada pengawasan fungsional terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berkaitan dengan kegiatan tersebut perlu dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan kendala yang dihadapi Inspektorat Jenderal. Gambaran tentang analisis SWOT Inspektorat Jenderal sesuai dengan **Gambar 1.1** berikut.



Gambar 1.1

Matrik Analisis SWOT Inspektorat Jenderal



Dari pertimbangan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan optimis mampu mencapai visi dan misi yang ditetapkan, namun diperlukan niat, dedikasi dan kesungguhan dari seluruh jajaran unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya.



BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

2.1.1. Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam mendukung Visi Presiden 2020-2024 Kementerian Perhubungan menetapkan Visi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong "

2.1.2. Visi Inspektorat Jenderal 2020-2024

Terwujudnya Inspektorat Jenderal Sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran dari Visi Inspektorat Jenderal dapat dimaknai sebagai berikut:

Strategic Partner, peran ini sangat dibutuhkan organisasi saat ini, dimana perubahan kebijakan sangat dinamis, Inspektorat Jenderal sebagai APIP diharapkan harus lebih cepat merespon keadaan dan memahami misi strategisnya organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai. Peran strategis tersebut meliputi identifikasi risiko strategis organisasi, bagaimana resiko dikelola dan mengusulkan solusi yang dapat dikembangkan.

Trusted Advisor, peran penting Inspektorat Jenderal terus berkembang dari fungsi *quality assurance* (fungsi penjaminan) menjadi fungsi *trusted advisor*, dimana melalui peran ini pengawasan intern harus memberikan rekomendasi yang bernilai tambah dan saran strategis serta berdampak



nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi yang didukung dengan Sumber Daya Pengawasan yang kompeten dan proaktif.

Akuntabilitas, peran ini dimana Inspektorat Jenderal menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning* terhadap peyelenggaraan APBN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.2. MISI

2.2.1. Misi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Perwujudan Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 diuraikan dalam empat agenda sebagai berikut:

- *Pertama*, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka **mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan**, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.
- *Kedua*, konektivitas nasional mampu **memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.
- *Ketiga*, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk **memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.
- *Keempat*, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas



masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Kementerian Perhubungan menyelaraskan Agenda Pembangunan Nasional dalam sektor transportasi melalui perwujudan Visi Kementerian terhadap Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Perhubungan dengan rumusan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

2.2.2. Misi Inspektorat Jenderal 2020-2024

Rumusan terhadap upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Meningkatkan peran SPIP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mewujudkan pengawasan intern, manajemen resiko, dan tata kelola yang inovatif, integritas dan amanah;



4. Mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
5. Meningkatkan layanan pengawasan intern;
6. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengawasan;
7. Mewujudkan organisasi pengawasan yang *agile*, efektif dan efisien;
8. Mewujudkan pengembangan inovasi teknologi bidang pengawasan;

Melalui penjabaran misi tersebut, Inspektorat Jenderal akan hadir sebagai *trusted advisor* yang dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan APBN dan Kinerja di Kementerian Perhubungan melalui aktivitas pengawasan intern terkini dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas serta dukungan Sarana Teknologi Informasi.

2.3. TUJUAN

2.3.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi.
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

2.3.2. Tujuan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Tujuan disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal dan berkontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Adapun tujuan fungsi pengawasan intern



2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
2. Terwujudnya restrukturisasi reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
3. Terwujudnya fungsi pengawasan intern efektif.
4. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai integritas, inovasi dan profesionalisme.
5. Tercapainya tata kelola dan kapabilitas pengawasan intern.
6. Terwujudnya SDM pengawasan yang adaptif dan *techonology savvy*.
7. Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan yang *agile*, efektif dan efisien.
8. Terwujudnya penggunaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis pengawasan.

2.4. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Pehubungan menetapkan delapan Sasaran Strategis (Utama) yang terbagi kedalam tiga Sasaran Strategis (SS) dan lima Sasaran Strategis Program (SSp) dengan rincian sebagai berikut:

SS. 1 Terwujudnya Konektivitas Nasional.

SS.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan.

SS.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

SSp.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi.

SSp.5 Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten.

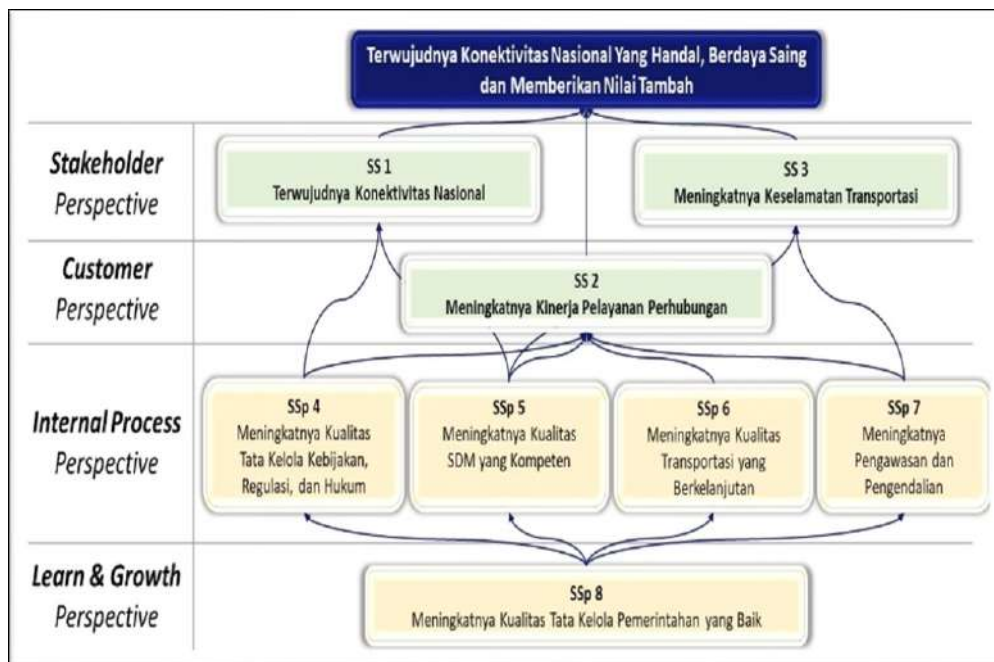
SSp.6 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan.

SSp.7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian.

SSp.8 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.



Gambar 2.1
Strategy Map Kementerian Perhubungan



Tabel 2.1
Sasaran Strategis, IKSS dan Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	TARGET KINERJA						
				2020	2021	2022	2023	2024		
STAKEHOLDERS	SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,634	0,666	0,695	0,725	0,763
	SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	83,00	85,00	88,40	88,50
CUSTOMER	SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 2.2	On Time Performance Layanan Transportasi	%	74,80	76,62	78,44	80,26	82,08
			IKSS 3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	Rasio	31,99	31,53	28,85	26,39	23,71
INTERNAL PROCESS	SSp 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKSp 4	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	%	73,5	80,00	88,30	88,30	94,80
	SSp 5	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	IKSp 5	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	SSp 6	Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan	IKSp 8	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	66,67	72,51	81,09	89,86	100,00
	SSp 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	IKSp 7	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	Opini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LEARN & GROWTH	SSp 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKSp 6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78,00	79,00	79,50	80,00	80,50

2.4.2. Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan,



dimana dari tujuan diharapkan dapat diformulasikan sebuah tujuan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART- C), sehingga sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan huruf 2.3.2, Inspektorat Jenderal telah menetapkan tujuh tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan sembilan sasaran yang terdiri dari tiga Sasaran Program (SP) yang capaiannya diukur dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan enam Sasaran Kegiatan (SK) yang capaiannya diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Sembilan sasaran tersebut mendukung Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terhadap *Internal Process Perspective* pada SSp. 7 yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian dan SSp. 8 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan. Penjabaran SP dan SK tersebut dalam tujuan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tujuan 1.

SP.1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah.

Tujuan 2.

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan 3.

SP.3 Meningkatnya Layanan Pengawasan.

Tujuan 4.

SK.1 Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif.

Tujuan 5.

SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas.

Tujuan 6.

- SK.3 Sumber Daya Manusia Pengawasan yang Kompeten.
- SK.4 Organisasi *Fit For Purpose*.

Tujuan 7.

- SK.5 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.



- SK.6 Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas.

Rumusan Capaian Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SP-1 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.

2. Customer Perspective

a. Mencakup SP-2 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

b. Mencakup SP-3 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 3 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi.
- IKP 4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu.
- IKP 5 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Internal Process Perspective

a. Mencakup SK-1 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.

- IKK 1 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM).
- IKK 2 Nilai Maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- IKK 3 Persentase Hasil *Peer Review* (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik.

b. Mencakup SK-2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.

- IKK 4 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
- IKK 5 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti.
- IKK 6 Persentase rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti.



- IKK 7 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- IKK 8 Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3.
- IKK 9 Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA.
- IKK 10 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN.
- IKK 11 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.
- IKK 12 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP Berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Internal Process Perspective

- a. Mencakup SK-3 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 13 Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi.
- b. Mencakup SK-4 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 14 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.
 - IKK 15 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM.
 - IKK 16 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal.
 - IKK 17 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal.
 - IKK 18 Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - IKK 19 Persentase Peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan.
 - IKK 20 Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti.
- c. Mencakup SK-5 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan.
- d. Mencakup SK-6 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 22 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.



Tabel 2.2

Langkah Konkrit Pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dalam Program Pengawasan Inspektorat Jenderal Terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP	
Kementerian Perhubungan yang berupaya mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	1. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Inspektorat Jenderal Sebagai <i>Strategic Partner</i> dan <i>Trusted Advisor</i> dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden	1	Meningkatkan Peran SPIP dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase TLHP BPK RI atas SPI dan Kepatuhan	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
			2	Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Mewujudkan Restrukturisasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jendral	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
			3	Mewujudkan Pengawasan Intern, Manajemen Resiko, dan Tata Kelola yang Inovatif, Integritas dan Amanah	Terwujudnya Fungsi Pengawasan Intern Efektif	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Meningkatnya Layanan Pengawasan	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
			4	Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang	Terwujudnya Internalisasi Nilai- Nilai Integritas, Inovasi dan Profesionalisme	Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan		Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
			5	Meningkatkan Layanan Pegawai Intern	Tercapainya Tata Kelola dan Kapabilitas Pengawasan Intern	Persentase Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
				Proses Pengawasan Bisnis Yang Efektif	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)			
					Nilai Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal			
					Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik			



VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP	
						Implementasi Pengawasan Berkualitas yang	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi Persentase Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3 Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reuiu RKA Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas hasil Reuiu RKBMN Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
			6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Pengawasan	Terwujudnya SDM Pengawasan yang Adaptif dan <i>Technology Savvy</i>	Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikasi Keahlian	Sumber Daya Manuasia Pengawasan yang Kompeten	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
			7	Mewujudkan Organisasi Pengawasan Yang	Terwujudnya Restrukturisasi Kelembagaan Yang	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM



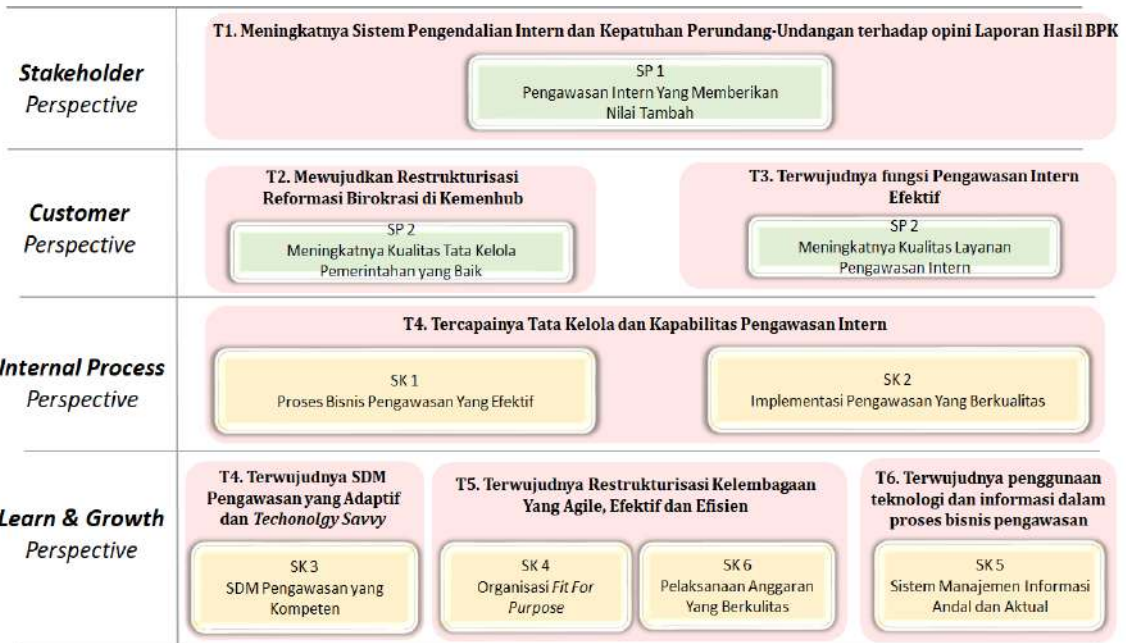
VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP
			Agile, Efektif dan Efisien	Agile, Efektif dan Efisien			Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Persentase pegawai yang melaporkan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Persentase Peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti
			8 Mewujudkan pengembangan Inovasi Teknologi di Bidang Pengawasan	Terwujudnya Penggunaan Teknologi Informasi dan dalam Proses Bisnis Pengawasan	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan	Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan



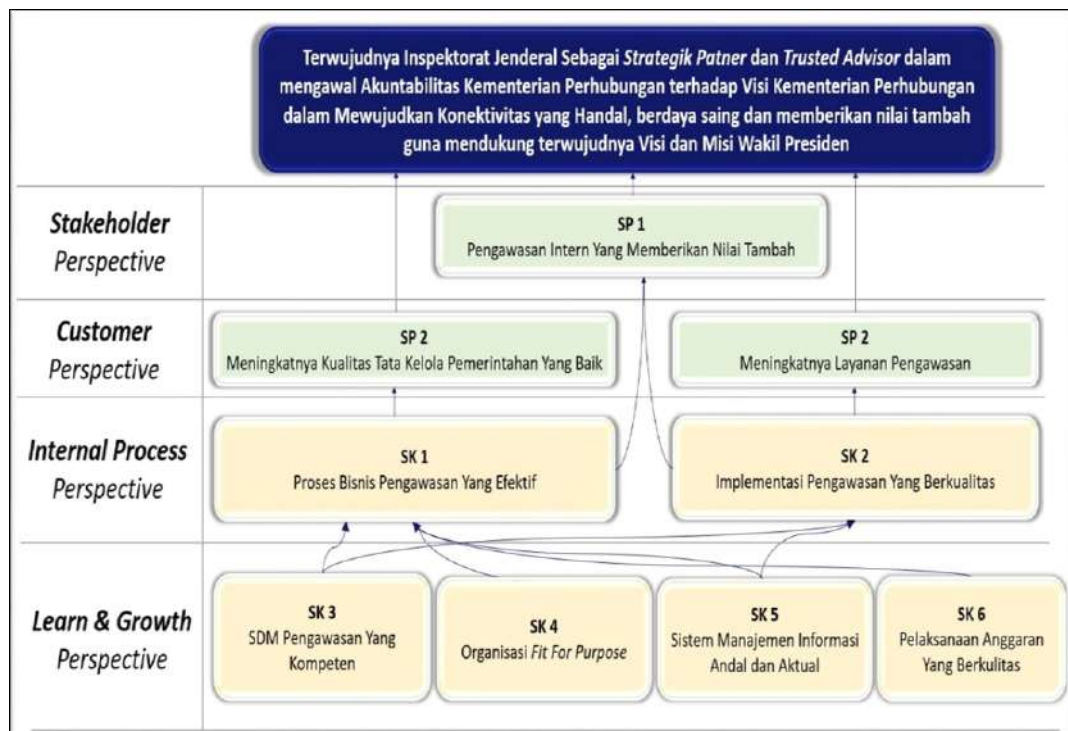
Selengkapnya Tujuan, Sasaran, Indikator dan Meta Indikator dapat dilihat pada **Gambar 2.2**, **Gambar 2.3** dan **Tabel. 2.3**.

Gambar 2.2

Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024



Gambar 2.3 Strategy Map Inspektorat Jenderal





Tabel 2.3

Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Meta

Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK		META INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SP.1	PENGAWASAN INTERN YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH	IKP.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini yang dikeluarkan BPK Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
Customer Perspective	SP.2	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	IKP.2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
	SP.3	MENINGKATNYA LAYANAN PENGAWASAN	IKP.3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, Responden adalah pegawai UPT/Satker (Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden) Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penilaian Kepuasan Pengawasan
			IKP.4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah Total Konsultasi yang dapat ditindaklanjuti (Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pengelolaan Tanya dan Konsultasi)
			IKP.5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan (Peraturan Irjen tentang Pedoman Audit pada Inspektorat Investigasi)
Internal Process Perspective	SK.1	PROSES BISNIS PENGAWASAN YANG EFEKTIF	IKK.1	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Jumlah Jawaban YA / Total Pernyataan x 100% Level Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Khusus Peningkatan Kapabilitas APIP)
			IKK.2	Nilai Maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (Sesuai Dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
			IKK.3	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	Persentase jumlah Inspektorat yang memperoleh Nilai hasil telaahan sejawat internal Minimal dengan kategori Baik (≥69%) / Jumlah Inspektorat yang ditelaah (Sesuai dengan Keputusan Ketua Umum DPN AAIP Kep-43/AAIPI/DPN/2019) SK. Inspektur Jenderal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Telaahan Sejawat



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK	META INDIKATOR
SK.2	IMPLEMENTASI PENGAWASAN YANG BERKUALITAS	IKK.4	Tingkat Kepuasan Pengawasan Nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, Responden adalah pegawai UPT/Satker (Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden) Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penilaian Kepuasan Pengawasan
		IKK.5	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti (sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan)
		IKK.6	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern)
		IKK.7	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan (Peraturan Irjen tentang Pedoman Audit pada Inspektorat Investigasi)
		IKK.8	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3 Jumlah Eselon I yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Level 3/Jumlah Unit Eselon I (Sesuai Dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
		IKK.9	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam rewi RKA Jumlah Nilai Anggaran Terkoreksi atas Permasalahan Ketidakelegkapan Dokumen Pendukung / Total Anggaran yang direviu (PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
		IKK.10	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN Rata-Rata Jumlah Persentase Aset Tanah dan Persentase BMN Lainnya yang disetujui (PMK 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara)
		IKK.11	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan Perbandingan Persentase SOR Tanpa Paragraf Penjelas / Jumlah SOR (PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan)
		IKK.12	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan Persentase Jumlah Eselon I yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal berpredikat BB /Jumlah Unit Eselon I (Sesuai dengan Peraturan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP)



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK		META INDIKATOR	
Learn & Growth Perspective	SK.3	SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN YANG KOMPETEN	IKK.13	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	Persentase Jumlah Auditor yang memenuhi 20 Jam Pelatihan Setahun dengan Bobot 80% dan Auditor yang memiliki Sertifikasi Profesi dengan Bobot 20%/ Jumlah Auditor (ISO 9001:2015 dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Peningkatan Kompetensi Auditor)
	SK.4	ORGANISASI FIT FOR PURPOSE	IKK.14	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai Inspektorat Jenderal Minimal dengan Kategori BB (Sesuai dengan Peraturan Permenpan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP)
			IKK.15	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah Unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah)
			IKK.16	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
			IKK.17	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Jumlah Wajib Lapo LHKPN di Inspektorat Jenderal yang melaporkan LHKPN /Jumlah Wajib Lapo LHKPN INSPEKTORAT JENDERAL (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2017 tentang LHKPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan)
			IKK.18	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Wajib Lapo LHKASN Kementerian Perhubungan yang melaporkan LHKASN/Jumlah Wajib Lapo LHKASN Kementerian Perhubungan (Sesuai dengan Intruksi Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan)
			IKK.19	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	Persentase Jumlah Peraturan Ditetapkan dan Disosialisasikan/ Program Penetapan Peraturan PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK		META INDIKATOR
		IKK.20	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Kegiatan Kerjasama yang dilakukan/ Jumlah MoU PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan
SK.5	SISTEM MANAJEMEN INFORMASI ANDAL DAN AKTUAL	IKK.21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Rata-Rata Persentase Proses Audit menggunakan aplikasi SIAu dan Persentase Proses Reviu menggunakan aplikasi e-Reviu Peraturan Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Audit Kinerja Menggunakan Aplikasi SIAu dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Reviu menggunakan Aplikasi e-Reviu
SK.6	EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS	IKK.22	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Jakarta IV (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga)

Secara rinci Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja atau Meta Indikator, telah tersusun kedalam Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang menjadi Lampiran dalam dokumen Rencana Strategis ini.



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah ditetapkan visi dan misi, Presiden juga memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan Presiden tersebut yaitu, 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan ke-5 (lima) arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketujuh agenda di atas, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah Agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan juga



tetap dapat mendukung agenda-agenda lainnya terutama melalui dukungan sektor transportasi.

3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan prioritas pembangunan di sektor transportasi dalam RPJMN 2020-2024, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional untuk dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi** untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah** sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa** sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan** guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana **Tabel 3.1.** di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Optimalisasi simpul transportasi eksisting	• Penguatan jaringan transportasi eksisting
	• Pembangunan simpul transportasi baru	• Perluasan jaringan layanan transportasi
	• Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia	• Penguatan transportasi antar moda dan multi moda



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktivasi jalur moda transportasi • Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia • Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. • Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi • Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi • Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia • Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda • Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi • Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan • Mengembangkan <i>prototipe</i> sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi <i>real time</i> OTP • Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan, gender, difabel, dan lansia



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kinerja logistik nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan <i>delay</i> yang terjadi pada sistem layanan transportasi Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (<i>Buy The Service</i>) Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, Panjang dermaga, kinerja bongkar muat) Pengembangan rute jaringan saling terhubung (<i>loop</i>) distribusi domestic Pengembangan sistem informasi logistik (e-logistic) Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan <i>hinterland</i> Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording. Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum; Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Sekolah (RASS) dan taman edukasi Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian Pengembangan sistem informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan Pembatasan usia sarana prasarana transportasi Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan Edukasi keselamatan transportasi Penyusunan dan penerapan SOP keamanan utama transportasi Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan EST (<i>Environmentally Sustainable Transportation</i>) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar
		<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi ; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni;
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan SDM Yang Berkarakter Dan Berintegritas; 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Link and Match SDM Transportasi;
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Masyarakat;
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai- nilai Agama;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara;
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (<i>Research & Development</i>); Transformasi kelembagaan Balai/ UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN; Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi.
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	<p>Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menghitung Nilai indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan feedback bagi peningkatan kualitas sistem transportasi Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi; Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan



3.1.3. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, strategi nasional pencegahan korupsi, dan tujuan Inspektorat Jenderal. Dukungan Inspektorat tersebut akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan dijalankan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan Inspektorat Jenderal disusun dengan berpedoman pada agenda pembangunan dan kebijakan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan harapan *stakeholders* agar Inspektorat Jenderal:

1. Fokus pada kegiatan dan risiko strategis,
2. Meningkatkan kegiatan konsultasi dalam memberikan nilai tambah terhadap Kementerian Perhubungan,
3. Meningkatkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi, dan;
4. Selaras dengan kebijakan Kementerian Perhubungan.

Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 meliputi:

1. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi

- a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi dalam rangka membuka aksesibilitas guna mencapai pemerataan ekonomi

Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui:

- 1) Pengawasan atas skema pendanaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);



- 2) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan dan *Public Service Obligation* (PSO);
- b. Perkuatan Jalur Logistik Utama dalam rangka Merajut Konektivitas Antar Wilayah
- Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Perkuatan Jalur Logistik Utama melalui:
- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung konektivitas.
- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata
- Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK melalui :
- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pemberian subsidi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor transportasi;
 - 3) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi yang mendukung aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
- d. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan
- Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Pengembangan Transportasi Perkotaan melalui:



- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan (*Buy The Service*);
- 2) Pengawasan atas pengadaan sarana dan sistem angkutan massal, pembangunan fasilitas integrasi antarmoda yang mendukung pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel.

2. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- d. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- e. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu "Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan melalui pencapaian opini WTP BPK dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran



- (RKA), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Laporan Keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
- b. Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa pandemic melalui *Fraud Management System*;
 - c. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
 - e. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan asset;
 - f. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
 - g. Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
 - h. Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui reviu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - i. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
 - j. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - k. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perhubungan,



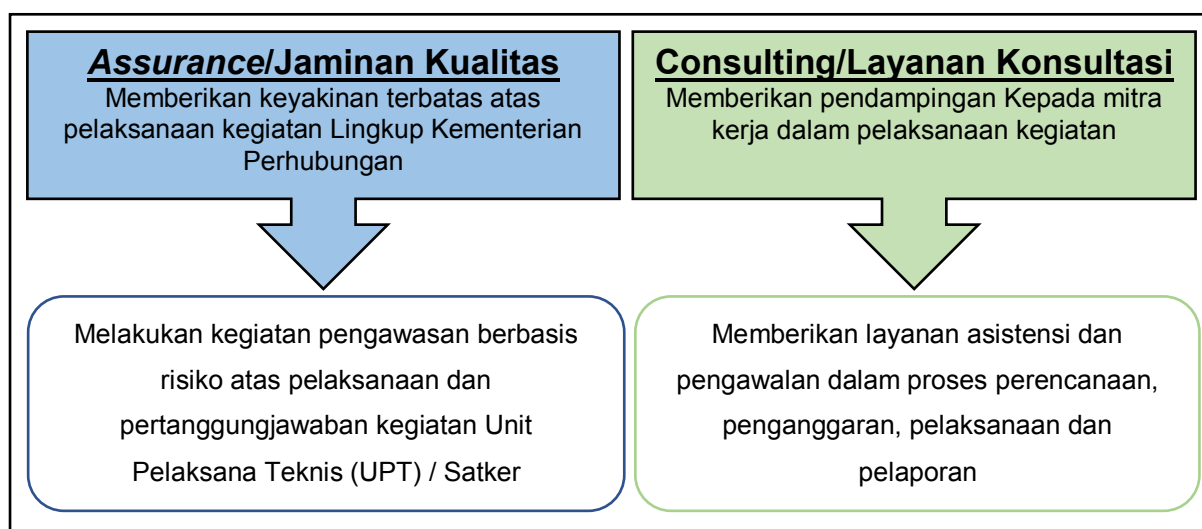
pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;

- l. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
- m. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Kegiatan *assurance*/jaminan kualitas dan *consulting*/layanan konsultasi merupakan dwiperan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP).

Gambar 3.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal





3.1.4. Tujuan Kebijakan Pengawasan Intern

Kebijakan Pengawasan Intern ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap peningkatan *good governance* dan *clean government* di Kementerian Perhubungan atas perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Apabila dijabarkan ke dalam kerangka logis portofolio (logic model), penjabaran dari tujuan dan peran serta layanan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sebagai berikut.

Gambar 3.2 Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal





3.2. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan *responsivitas* terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*)** untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;
2. **Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri dan Inspektur Jenderal (*directive*);**
3. **Pengawasan berbasis teknologi informasi**, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui implementasi inovasi penerapan *data analytics* (DA) dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA), agar mampu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa prediksi kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal transformasi digital Kementerian Perhubungan.
4. **Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)**, yaitu penguatan fungsi UKI sebagai *second line of defense*. Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan pemantauan pengendalian intern, profiling pegawai dan penyusunan *fraud risk scenario* di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kelembagaan UKI.
5. **Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Berfokus pada Aspek Pencegahan**, yaitu:
 - a. Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - b. Pencegahan dan Penindakan Praktek *Fraud*;
 - c. Peningkatan Peran serta Pengawasan dari Masyarakat melalui Sarana Pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*) terhadap Pelayanan Publik di Sektor Transportasi;
 - d. Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam upaya meningkatkan budaya Pencegahan Gratifikasi;



- e. Mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku;
 - f. Membentuk Komite Audit.
6. **Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya**, sebagai berikut:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum.



7. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengawasan**, yaitu dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) s.d. 2024 untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu, meningkatkan jumlah SDM dalam memperoleh Sertifikasi Profesi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Manajerial, penyelenggaraan seminar/*workshop*, dengan pemenuhan pelatihan minimal 10 hari kerja setahun.
8. **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, melalui:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (*outcome*).
 - b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), guna mewujudkan organisasi yang *agile*, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak membebani anggaran.
 - c. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
 - d. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
9. **Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa konsultasi** terkait implementasi sistem pengendalian intern, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola (*Good Governance*) pelaksanaan tupoksi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi yang dihadapi pegawai;
10. **Peningkatan kapabilitas pengawasan intern**, dimana sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (*integrated*) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dan pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (*managed*) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern



melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

3.3. KERANGKA REGULASI BIDANG PENGAWASAN 2020-2024

3.3.1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan

Untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Perhubungan diperlukan beberapa regulasi dalam bidang pengawasan antara lain:

1. Penerapan Manajemen Risiko

Regulasi ini dibutuhkan dalam hal mendeteksi terhadap kemungkinan risiko atau dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal kebijakan dan operasional melalui pendekatan sistematis.

2. Unit Kepatuhan Internal (UKI) menjadi bagian dalam struktur organisasi bukan *ad hoc* atau kelompok kerja

Regulasi ini berkaitan dengan point satu di atas. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mempunyai tanggung jawab jelas secara vertial. Perwujudan UKI merupakan implementasi dari konsep *three lines of defense* (tiga lini pertahanan) yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian suatu organisasi. Konsep ini Inspektorat Jenderal berada pada muara pertahanan terakhir dengan kapasitas melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian yang membahayakan organisasi, sedangkan UKI berada pada lini pertahanan kedua yang bertugas untuk memantau pengendalian intern dan memperingatkan lini pertama bila dijumpai kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian (*early warning system*). Seluruh pegawai termasuk Kepala Kantor adalah lini pertahanan pertama, yaitu lini pertahanan terpenting dalam mencegah kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian

Regulasi ini dibutuhkan sesuai dengan kondisi terkini, dengan bertambahnya peran Inspektorat Jenderal dari perencanaan hingga pemantauan diperlukan peran langsung dari dalam organisasi sebagai



unit pertahanan kedua atas unit pertanian pertahanan pertama sebagai pemilik proses bisnis atau manajerial.

3. *Road Map/Blue Print* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Peningkatan peran dan fungsi pengawasan tentunya harus berjalan lurus atau didukung dengan sarana yang dapat menyesuaikan kondisi terkini, dari sisi pengawasan implementasi. Dukungan sarana tersebut tentunya berfokus kepada teknologi dan informasi yang sumber awal datanya terintegrasikan dengan unit kerja. Integrasi data yang baik dapat mewujudkan pelaksanaan audit/pengawasan berkelanjutan (*continuous auditing*) oleh Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) dari manajemen di masing-masing Unit Kerja.

Selain hal tersebut, penetapan regulasi *road map* TIK dapat mempermudah implementasi *e-government* yang kematangan implementasinya diukur melalui indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.3.2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terdapat tiga perangkat profesi yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melakukan tugasnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perangkat profesi tersebut terdiri dari Standar Audit, Kode Etik dan Telaah Sejawat yang telah ditetapkan oleh Lembaga profesi auditor internal Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Namun perkembangan peran pengawasan sangat dinamis dan terus berkembang, peran Inspektorat Jenderal yang bermula *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consultant* kini sudah beralih menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor*. Outcome pengawasan tidak hanya sebagai penjamin mutu dan memberi masukan, namun juga harus berperan sebagai mitra dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung perwujudan peran



tersebut diperlukan beberapa kerangka regulasi dalam hal operasional pengawasan yang terus disesuaikan mengikuti kondisi terkini dan perkembangan organisasi dalam hal:

1. Regulasi Tata Kelola Pengawasan Intern;
 - Kebijakan Pengawasan Intern.
 - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 - Piagam Internal Audit/ *Audit Internal Charter*.
 - Tata Cara Tetap Pengawasan Intern.
 - Pembentukan Komite Audit.
 - Kendali Mutu Pengawasan.
2. Regulasi pelaksanaan pengawasan
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Kinerja dengan menggunakan dukungan teknologi informasi.
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Reviu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi.
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring.
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi.
 - Tata Cara Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
 - Tata Cara Konsultasi.
 - Tata Cara Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan.
 - Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pelaporan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja.
 - Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non Audit (Reviu, Evaluasi Monitoring).
3. Regulasi Dukungan Manajemen
 - Pola Karir Sumber Daya Pengawasan.



- Tata Cara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Auditor.
- Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Pengawasan.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN 2020-2024

3.4.1. Kerangka Umum Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan, hal tersebut sebagaimana **Gambar 3.3** struktur organisasi Kementerian Perhubungan.

Gambar 3.3

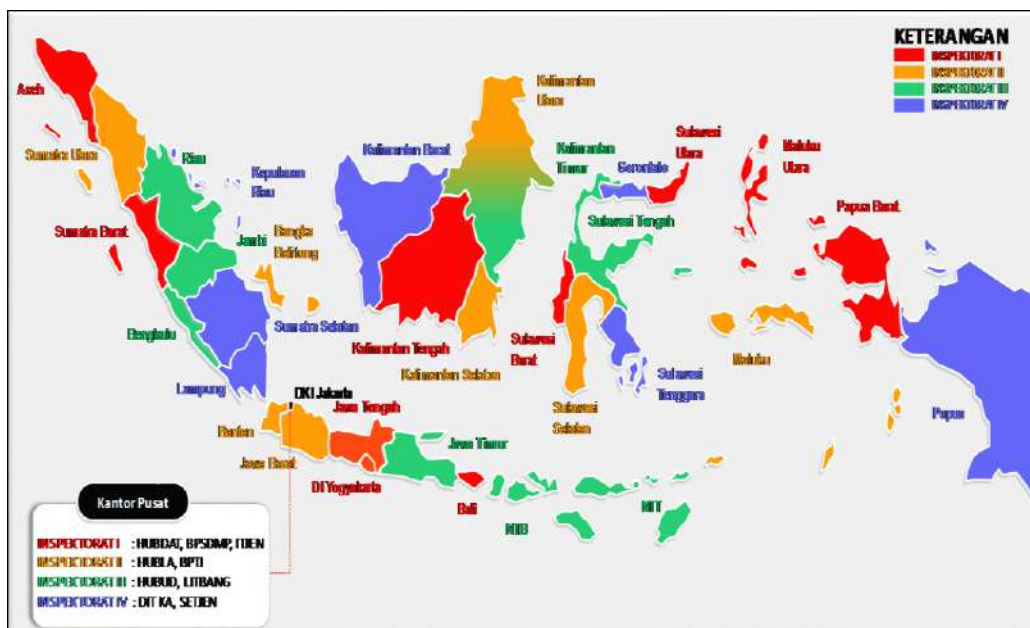
Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan



Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap sembilan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana dari sembilan Unit Eselon I tersebut terdapat kurang lebih lima ratus delapan puluh Objek Audit /Unit Pelaksana Teknis yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, berikut sebaran Objek Audit sebagaimana **Gambar 3.4** dan Jumlah Objek Audit sebagaimana **Gambar 3.5**.



Gambar 3.4
Sebaran Objek Audit



Gambar 3.5
Jumlah Objek Audit

PROPINSI/WILAYAH								
WILAYAH BARAT								
SUMATRA	ACEH	18	SUMATRA UTARA	26	RIAU	17	KEP. RIAU	13
	SUMATRA BARAT	10	BANGKA BELITUNG	6	BENGKULU	5	SUMATRA SELATAN	9
JAWA	JAWA TENGAH	17	BANTEN	11	JAWA TIMUR	24	LAMPUNG	8
KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	15	JAWA BARAT	12	DKI JAKARTA	15		
			KALIMANTAN SELATAN	7	KALIMANTAN TIMUR	16	KALIMANTAN BARAT	14
			KALIMANTAN UTARA	12				
WILAYAH TENGAH								
SULAWESI	SULAWESI UTARA	16	SULAWESI SELATAN	28	SULAWESI TENGAH	19	GORONTALO	6
	SULAWESI BARAT	5			NTB	10	SULAWESI TENGGARA	15
NTB DAN BALI	BALI	9						
WILAYAH TIMUR								
NTT DAN MALUKU	MALUKU UTARA	18	MALUKU	27	NTT	30	PAPUA	51
PAPUA	PAPUA BARAT	28						
KANTOR PUSAT								
	DITJEN DARAT	6	DITJEN LAUT	6	DITJEN UDARA	6	DITJEN KA	5
	BPSDM	5	BPTJ	1	LITBANG	5	SETJEN	12
	ITJEN	1					ATASE	8
TOTAL		148		136		140		156
				580				

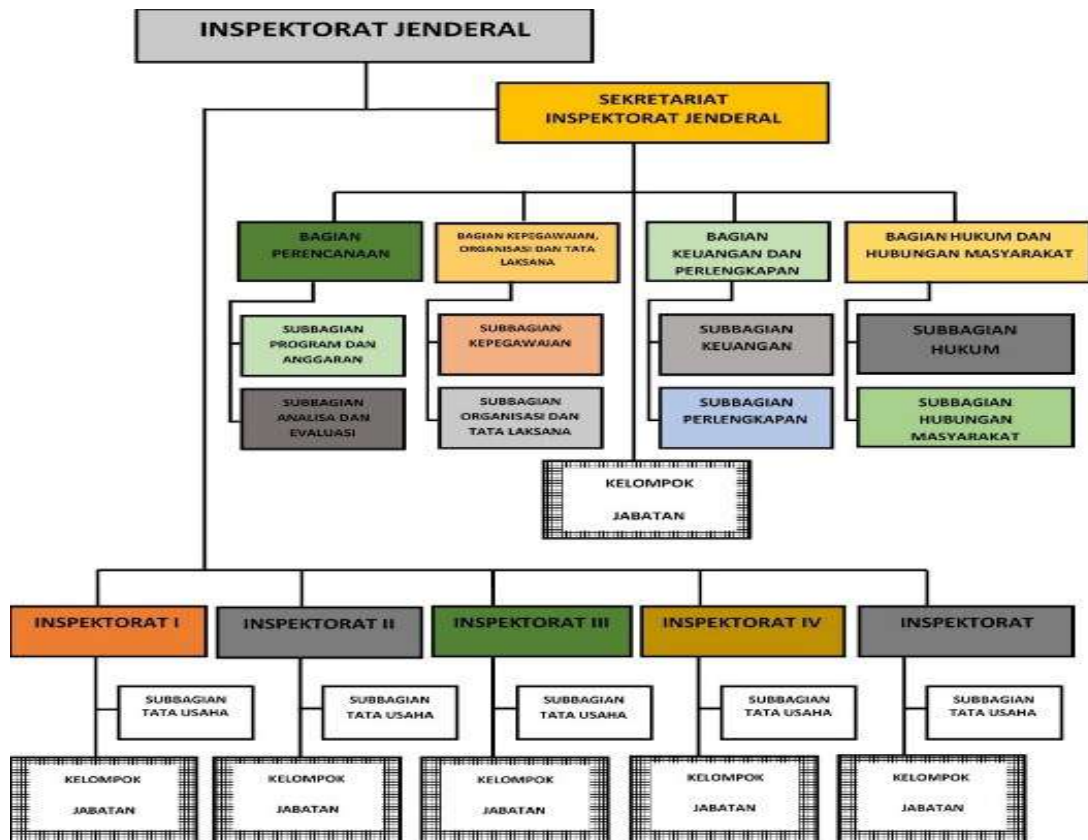


Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Inspektur Jenderal dibantu oleh 6 (enam) unit eselon dua yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 5 (lima) Inspektur.

Secara terstruktur hirarki organisasi Inspektorat Jenderal terjabar dalam **Gambar 3.6**.

Gambar 3.6

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



3.4.2. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasannya Inspektorat Jenderal memerlukan penguatan kelembagaan bidang pengawasan seperti:

1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan



pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Unit Kepatuhan Internal

Penjelasan tentang unit kepatuhan internal telah dibahas dalam **butir 3.2.2** terkait Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan.

3.4.3. Road Map Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal

Salah satu arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2019 adalah instansi pemerintahan perlu melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level dan mengganti/mengalihkan jabatan struktural pengampunya dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu.

Guna mewujudkan peran Inspektorat Jenderal menuju *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor*, perlu dilakukan peningkatan profesional SDM pengawasan, peningkatan fungsi Pengawasan Intern dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan, serta peningkatan tata kelola pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didukung hasil kuesioner evaluasi penataan organisasi yang menyatakan perlunya penataan terkait fungsi pengelolaan teknologi informasi, fungsi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan pengawasan dengan mempertimbangkan pembagian objek pengawasan.

Inspektorat Jenderal akan mengubah paradigma audit yang sebelumnya dilaksanakan dengan langsung mendatangi kantor mitra pengawasan dalam *field audit* dengan *remote audit* (audit jarak jauh) dengan memanfaatkan *big data* yang dihasilkan aplikasi-aplikasi unit Eselon I untuk diolah dan dianalisis secara menyeluruh melalui *data analytic* sesuai *recent best practices* audit internal era digital. *Remote audit* akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan kondisi infrastruktur dan kompetensi pegawai memenuhi syarat minimum yang diperlukan untuk



dilakukan secara penuh. Namun demikian, praktik audit langsung ke kantor mitra pengawasan juga masih dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan *nature* pengawasan atas suatu proses bisnis yang dijalankan. Melalui kombinasi praktik audit ini, ruang lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan semakin luas dan cepat sehingga mampu menghasilkan simpulan yang lebih komprehensif, relevan, dan bermanfaat dalam memberikan masukan strategis kepada Menteri Perhubungan.

Organisasi Inspektorat Jenderal ke depan juga diharapkan dapat berjalan dengan *agile* dalam bentuk sinergi pelaksanaan tugas baik antar inspektorat maupun antar bagian di Sekretariat untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal. Sinergi antar inspektorat diharapkan dapat terwujud melalui penyusunan tema pengawasan terintegrasi pada level Inspektorat Jenderal yang melibatkan Inspektorat terkait, misalnya berbasis tema fungsi Kementerian Perhubungan (pelayanan publik, subsidi perintis dan tema lainnya). Namun demikian usulan penataan organisasi tersebut merupakan inisiatif dan bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Perhubungan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Perhubungan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara mendasar penataan organisasi Inspektorat Jenderal adalah mengubah struktur organisasi menjadi dua level dan pada setiap eselon II terdapat sub bagian yang menangani ketatausahaan. Selain itu, dalam rangka menunjang optimalisasi fungsi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengelolaan teknologi informasi, perlu dibentuk unit yang menangani tugas-tugas dimaksud. Penataan lainnya berupa perubahan pembagian objek pengawasan sebagai penajaman fungsi yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengorganisasian pekerjaan serta penyeimbangan beban kerja.

Rencana penataan organisasi Inspektorat Jenderal akan dilaksanakan melalui, antara lain:



1. Pembagian Kelompok Subtansi

Salah satu langkah konkret dalam penyederhanaan organisasi adalah mengalihkan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kebijakan di Kementerian Perhubungan adalah mengalihkan seluruh Jabatan Administrasi (eselon III dan IV) ke dalam Jabatan Fungsional, kecuali jabatan ketatausahaan (Kasubag TU) pada masing-masing Eselon II. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang beragam perlu dibantu kelompok jabatan fungsional, yang disebut kelompok subtansi, ini berbeda dengan susunan bagian pada struktur organisasi saat ini. Hal ini bertujuan untuk menunjang optimalisasi pengelolaan teknologi informasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Pembagian kelompok subtansi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pembagian Kelompok Subtansi

Susunan Organisasi sesuai PM 122/2018	Pembagian Kelompok Subtansi	Justifikasi Perubahan
Bagian Perencanaan a. Subbag Program dan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Perencanaan • Fungsi Penganggaran b. Subbag Analisa dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Monitoring dan Evaluasi • Fungsi Pengelolaan data hasil pengawasan • Fungsi teknologi dan informasi 	Kelompok Subtansi Perencanaan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Perencanaan • Fungsi Penganggaran • Fungsi Pengelolaan kinerja organisasi • Fungsi Monitoring dan evaluasi • Fungsi Pemantauan Pengendalian Intern 	Adanya pengurangan fungsi pengelolaan data hasil pengawasan dan teknologi informasi. Tujuannya adalah pengurangan beban kerja dan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal, termasuk juga pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, serta peningkatan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Jenderal
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Subbag Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan kepegawaian • Fungsi pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional 	Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan kepegawaian • Fungsi pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional • Fungsi pengelolaan kinerja pegawai 	Adanya pengurangan fungsi ketatausahaan dan penambahan fungsi hukum. Penambahan fungsi hukum diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan khususnya penetapan



Susunan Organisasi sesuai PM 122/2018	Pembagian Kelompok Substansi	Justifikasi Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan kinerja pegawai b. Subbag Organisasi dan Tata Laksana <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi penataan organisasi dan tata laksana • Fungsi pengelolaan reformasi birokrasi • Fungsi ketatausahaan Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi penelaahan, penyusunan dan dokumentasi regulasi • Fungsi bantuan dan pertimbangan hukum • Fungsi penataan organisasi dan tata laksana • Fungsi pengelolaan reformasi birokrasi 	<p>proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal.</p>
<p>Bagian Keuangan dan Perlengkapan</p> <p>a. Subbag Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran • Fungsi penatausahaan keuangan <p>b. Subbag Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan BMN • Fungsi pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 	<p>Bagian Keuangan Dan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran • Fungsi penatausahaan keuangan • Fungsi pengelolaan BMN • Fungsi pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan • Fungsi ketatausahaan 	<p>Adanya penambahan fungsi ketatausahaan. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan diharapkan dapat saling mendukung.</p>
<p>Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat</p> <p>a. Subbag Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi penelaahan, penyusunan dan dokumentasi regulasi • Fungsi bantuan dan pertimbangan hukum <p>b. Subbag Humas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi kehumasan dan pengelolaan komunikasi publik • Fungsi protokoler 	<p>Bagian Sistem Informasi Pengawasan / Bagian Pengelolaan Informasi Dan Hasil Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi teknologi dan informasi • Fungsi kehumasan dan pengelolaan komunikasi publik • Fungsi protokoler • Fungsi Pengelolaan data hasil pengawasan • Fungsi pemantauan TL pengawasan 	<p>Dalam era digitalisasi, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi pengawasan untuk semua pelaksanaan kegiatan. Teknologi informasi juga dapat menunjang pengelolaan data hasil pengawasan. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan komunikasi informasi publik dapat lebih optimal didukung dengan teknologi dan informasi.</p> <p>Untuk fungsi pemantauan tindak lanjut pengawasan diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut</p>



Susunan Organisasi sesuai PM 122/2018	Pembagian Kelompok Substansi	Justifikasi Perubahan
		hasil pengawasan oleh Inspektorat.

2. Penataan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dengan mengoptimalkan peran APIP sebagai katalis dan konsultan, objek pengawasan pada Inspektorat direncanakan akan diusulkan perubahan dari berbasis wilayah menjadi mitra Eselon I.

Pembagian objek pengawasan berdasarkan mitra Eselon I dibuat dengan mempertimbangkan beban pelaksanaan pengawasan, yaitu jumlah auditi dan besaran anggaran, serta indikasi penyalahgunaan anggaran.

3.4.4. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savvy*

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut jumlah, keahlian, kemampuan, dan pengetahuan teknis dan manajerial pegawai harus sesuai dengan tugas fungsi yang akan dilaksanakan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal serta tuntutan agar Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang lebih besar sebagai unit internal audit Kementerian Perhubungan mengakibatkan perlunya dilakukan antisipasi atas pengelolaan dan pengembangan SDM. Hal tersebut merupakan konsekuensi agar Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.



1. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Inspektorat Jenderal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Inspektorat Jenderal. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020.

Berdasarkan penghitungan, kebutuhan pegawai sesuai ABK adalah sejumlah 296 orang untuk formasi Auditor dan 180 orang untuk formasi Non Auditor. Penghitungan proyeksi pegawai hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	296	296	296	296	296
2	Bezetting Pegawai	148	156	200	207	216
3	Pensiun	1	3	5	3	4
4	Rekrutmen	9	47	12	12	12
NON AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	180	180	180	180	180
2	Bezetting Pegawai	114	131	164	171	173
3	Pensiun	0	3	3	3	2
4	Rekrutmen	17	36	10	5	5

Keterangan:

- Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi ABK dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata tren ABK selama 5 tahun sebelumnya
- Rekrutmen ASN dalam proses pengusulan/belum ditetapkan di level Kementerian
- Perhitungan jumlah ASN berasal dari Bezetting dikurangi prediksi pensiun, prediksi pegawai keluar selain pensiun (pindah instansi, mengundurkan diri, pemberhentian, dll) dan ditambah rekrutmen untuk tahun 2020



2. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

a. Rekrutmen

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Pelaksanaan PKPT dan tugas-tugas lainnya membutuhkan sumber daya, khususnya SDM. Tanpa dukungan SDM yang memadai maka pelaksanaan tugas akan terganggu dan bahkan menghambat kelancaran tugas. Oleh sebab itu, setiap unit di Inspektorat Jenderal membutuhkan jumlah SDM yang cukup sesuai dengan kebutuhan unit-nya masing-masing. Namun demikian, telah dilakukan penghitungan ulang kebutuhan pemenuhan SDM yang berasal dari penerimaan umum dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi, proses bisnis, dan perkembangan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian maka kebijakan pemenuhan SDM Inspektorat Jenderal secara selektif didasarkan pada kebutuhan prioritas SDM dan rencana strategis tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Permintaan kebutuhan riil SDM dari masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan:
 - Perubahan struktur organisasi (*lean and flatten*)
 - Perubahan proses bisnis (*modern, boundaryless, and streamlined process*).
 - Perkembangan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas
 - Dinamika pengelolaan keuangan negara dan perluasan area pengawasan
 - Kebutuhan kompetensi dan kualifikasi yang perlu segera dipenuhi dalam jangka waktu di bawah 5 {lima} tahun
- 2) Pemenuhan formasi auditor secara bertahap sampai dengan tahun 2024 berdasarkan usulan formasi yang telah ditetapkan KemenPAN-RB;



- 3) Pengisian formasi jabatan fungsional baru dalam rangka *delayering* berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan jabatan fungsional yang relevan secara bertahap.

Adapun strategi pemenuhan kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 melalui:

- 1) Permintaan pengisian kebutuhan pegawai dengan kompetensi dan kualifikasi spesifik sesuai persyaratan melalui mekanisme rekrutmen yang selektif dan *internal job vacancy*;
- 2) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional auditor bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan sesuai formasi;
- 3) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan formasi dan linimasa pelaksanaan *delayering*;
- 4) Mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan di Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan pemanfaatan TI dan perubahan proses bisnis;
- 5) Pengisian jabatan yang lowong melalui jalur promosi dengan mekanisme Manajemen Talenta.

b. Pengembangan SDM

Dalam Sistem Merit, pengembangan kompetensi SDM merupakan salah satu poin yang dipandang esensial karena SDM merupakan aset organisasi yang perlu terus-menerus mendapatkan peningkatan kapasitas sehingga dapat mendukung organisasi dalam rangka mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah suatu pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya.

Tujuan dari pengembangan kompetensi SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;



- 2) Mendukung perubahan sikap, perilaku dan pola pikir SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan, pemberian pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi baik yang bersifat nasional maupun global.

Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal salah satunya adalah perkembangan teknologi yang secara masif menuntut perubahan pola kerja lama serta peningkatan kompetensi di bidang teknologi. Selain itu, terjadinya *shifting* peran Inspektorat Jenderal dari *watch dog* menjadi *strategic advisor* juga merupakan tuntutan lain yang mendorong auditor untuk memiliki *leadership skill* yang tinggi, dapat berpikir secara *technical* dan strategis.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi perilaku (*soft competency*), kompetensi teknis (*hard competency*) dan kompetensi social kultural. Pengembangan *soft competency* dan Social kultural diarahkan untuk mendukung perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pegawai, serta peningkatan kompetensi manajerial sesuai dengan standar kompetensi jabatan ASN serta kompetensi *strategic thinking* dan *decision making* untuk menjawab tantangan yang ada. Di samping itu pengembangan *hard competency* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan *skill* dan *knowledge*, termasuk kemampuan bidang teknologi informasi dan *data analytics* untuk mendukung pegawai agar memiliki kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan berbagai metode yang tentu saja akan membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kompetensi serta perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pegawai, seperti:

- 1) Pelatihan tatap muka
- 2) Penyelenggaraan sertifikasi



- 3) Pendidikan gelar di dalam maupun luar negeri
- 4) *Action Learning*, pembelajaran jarak jauh
- 5) *Benchmarking*
- 6) *Coaching* dan *mentoring*
- 7) Pembelajaran mandiri
- 8) *Community of practice*.

Di samping itu, perkembangan teknologi juga dapat menjadi sarana pengembangan yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal akan terus ditingkatkan melalui pelaksanaan pembelajaran secara *online* (*e-learning*) maupun *coaching* and *mentoring* secara *online*, agar dapat mengatasi tantangan jarak serta manajemen waktu pegawai.



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan IKSp Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Operasionalisasi terhadap perwujudan ukuran kinerja pengawasan 2020-2024 terjabarkan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) melalui empat perspektif. Untuk pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) pada Sasaran Program (SP) terdapat pada *stakeholder perspective* dan *customer perspective*, sedangkan untuk pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Kegiatan (SK) yang berbasis *outcome* dan *output* penting terdapat pada *internal process perspective* serta *learning and growth perspective*, secara rinci Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 disampaikan pada **Lampiran 2**.

4.1.1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan memenuhi kriteria SMART, sehingga dapat dijadikan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 4.1
Kinerja Program

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	1.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
CUSTOMMER PERSPECTIVE			
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
3.	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3.1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi



SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	
		3.2	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
		3.3	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap perwujudan sasaran kegiatan. IKK dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas ada pada tingkat Eselon II. Penajaman Indikator Kinerja yang berkategori output terdapat pada Indikator Kinerja Individu atau teletak pada sebaran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Tabel 4.2
Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>			
1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	1.1	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)
		1.2	Nilai Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal
		1.3	Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik
2	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	2.1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
		2.2	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
		2.3	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
		2.4	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
		2.5	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3



SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
		2.6	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA
		2.7	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN
		2.8	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
		2.9	Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
3.	Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	3.1	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
4.	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	4.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
		4.2	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
		4.3	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
		4.4	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal
		4.5	Persentase Pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan
		4.6	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan
		4.7	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti
5.	Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Aktual	5.1	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan
6.	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	6.1	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

4.1.3. Target Kinerja

1. Target Pencapaian Sasaran Program

Target kinerja Program Program Pengawasan diukur melalui tiga Sasaran Program (SP) melalui empat Indikator Kinerja Program (IKP). Postur Sasaran dan Indikator tersebut ditetapkan agar dapat



mewujudkan Sasaran Strategis Program (SSP) Kementerian Perhubungan terhadap Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun sebaran target kinerja program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Target Sasaran Program Pengawasan

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	1.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	NILAI	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3.1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	PERSENTASE	0	63	65	67	69	71
		3.2	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	PERSENTASE	0	70	80	85	90	95
		3.3	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	PERSENTASE	80	82	85	87	90	95

2. Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Kegiatan Pengawasan diukur melalui enam Sasaran Kegiatan (SK) melalui dua puluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Postur Sasaran dan Indikator tersebut ditetapkan agar dapat mewujudkan tiga SP Inspektorat Jenderal terhadap Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatnya Layanan Pengawasan dengan rincian pada table berikut:



Tabel 4.4
Target Sasaran Kegiatan Pengawasan

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2020	2021	2022	2023	2024
1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	1.1	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	LEVEL	3 (60%)	3 (60%)	3 (70%)	3 (90%)	3 (100%)	4 (60%)
		1.2	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	LEVEL	3	3	3	3	3	4
		1.3	Persentase Hasil Peer Review (<i>Telaahan Sejawat</i>) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	%	100	60	60	80	80	100
2	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	2.1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	0	63	65	67	69	71
		2.2	Persentase rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti	%	75	80	82	85	87	90
		2.3	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	%	80	82	85	86	87	90
		2.4	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80	82	85	87	90	95
		2.5	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	66,7	75	80	85	95	100
		2.6	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA	%	29,9	29	28	27	26	25
		2.7	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	%	68,19	70	72	74	76	78
		2.8	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	%	18	27	36	45	55	63
		2.9	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80,9	80,9	81,2	81,7	82,5	85
3	Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	3.1	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	%	-	60	70	75	80	85
4	Organisasi Fit For Purpose	4.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	%	80,84	82	84	86	88	90
		4.2	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	UNIT	12	3	3	3	3	3
		4.3	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	%	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5
		4.4	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	%	100	100	100	100	100	100



SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2020	2021	2022	2023	2024
		4.5	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100	90	95	95	100	100
		4.6	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	%	100	100	100	100	100	100
		4.7	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti	%	0	100	100	100	100	100
5	Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Aktual	5.1	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	%	0	75	95	95	98	100
6	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	6.1	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	%	96,69	90	92	94	96	98

4.2. KERANGKA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2020-2024

Sesuai arahan Presiden dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan dan Redesain Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output, yang berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 masih menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang eksisting. Tujuan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain adalah:

1. Mewujudkan implementasi kebijakan *money follow* program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga;
4. Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;



7. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga (level pemerintah pusat) dan belanja Pusat-Daerah;
8. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tugas dan Fungsi K/L dan Daerah;
9. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “*real work*” (konkret).

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain:

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, output dan outcome;
2. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan;
3. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal;
4. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem Informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian/ Lembaga;
6. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran (Output) yang mencerminkan “*real work (eye catching)*”;
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar Kegiatan dan Output Program.

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-357/MK.02/2020; B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, Inspektorat Jenderal memiliki 1 (Satu) Program yaitu Dukungan Manajemen, yang semula memiliki 6 (enam) kegiatan menjadi 8 (delapan) kegiatan. Rincian Matrik semula-menjadi Restrukturisasi Program dan Kegiatan ditunjukkan pada Tabel 4.5.



Tabel 4.5
Matrik Semula-Menjadi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal

SEMULA				MENJADI					
UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
Inspektorat Jenderal									
Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen		Sekretariat Jenderal (Koord.)	WA	Program Dukungan Manajemen			TETAP
Inspektorat I	1943	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat I	4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Inspektorat Jenderal	Ekonomi/ Transportasi	BARU
Inspektorat II	1944	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat II			Ekonomi/ Transportasi	BARU	
Inspektorat III	1945	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat III			Ekonomi/ Transportasi	BARU	
Inspektorat IV	1946	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat IV			Ekonomi/ Transportasi	BARU	
Inspektorat Investigasi	1947	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat Investigasi			Ekonomi/ Transportasi	BARU	



SEMULA				MENJADI					
UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
Sekretariat Inspektorat Jenderal	1948	Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Ekonomi/ Transportasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	4663	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4665	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4818	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4820	Legalitas dan Litigasi Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4668	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					4669	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU



Untuk dapat mewujudkan Sasaran Program dan melaksanakan Sasaran Kegiatan di Inspektorat Jenderal dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, maka telah tersusun kerangka kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal melalui APBN Tahun 2020-2024, pada tahun 2020 terdapat pemotongan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 29% atau sebesar Rp35.5 Milyar dari alokasi sebesar Rp124.6 Milyar menjadi Rp89 Milyar untuk penanggulangan penanganan COVID-19. Rancangan kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 s.d. 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah sebesar Rp758 Milyar dengan didistribusi setiap tahunnya disusun mengikuti redesain struktur anggaran di Kementerian dan Lembaga sebagaimana Surat Edaran Bersama (SEB) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No B-157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Struktur tersebut terkategori dalam prinsip penyusunan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dalam grup Administrasi Pemerintahan Internal dengan jenis KRO Dukungan Manajemen Internal.

Tabel 4.6
Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2020-2024

(dalam jutaan)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2020	KERANGKA PENDANAAN				TOTAL
			2021	2022	2023	2024	
WA	Program Dukungan Manajemen						
4636	<i>Pelaksanaan Pengawasan Internal</i>	41.130	51.368	62.353	76.371	90.707	321.929
EAK	Layanan Pengawasan Internal	41.130	51.368	62.353	76.371	90.707	321.929
4663	<i>Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan</i>	9.499	6.285	7.581	10.064	12.448	45.877
EAF	Layanan SDM	1.077	884	1.416	2.575	3.423	9.375
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.622	2.401	2.655	3.383	4.221	19.282
EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1.800	3.000	3.510	4.106	4.804	17.220
4664	<i>Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan</i>	66.780	57.770	60.267	62.087	64.311	311.215
EAA	Layanan Perkantoran	44.982	46.811	48.439	49.296	49.846	239.374
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	736	655	930	1.289	1.897	5.507



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2020	KERANGKA PENDANAAN				TOTAL
			2021	2022	2023	2024	
EAC	Layanan Umum	13.063	3.219	3.316	3.415	3.518	26.531
EAD	Layanan Sarana Internal	1.136	2.506	3.570	3.641	3.714	14.567
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6.863	4.579	4.012	4.446	5.336	25.236
4665	<i>Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan</i>	585	3.162	4.228	5.359	6.513	19.847
EAJ	Layanan Data dan Informasi	585	3.162	4.228	5.359	6.513	19.847
4668	<i>Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</i>	-	-	4.569	5.136	7.850	17.554
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	4.569	5.136	7.850	17.554
4669	<i>Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan</i>	260	1.000	2.565	3.625	5.005	12.455
AEC	Kerjasama	130	500	1.240	1.850	2.540	6.260
AEE	Kemitraan	130	500	1.325	1.775	2.465	6.195
4818	<i>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan</i>	3.324	1.607	2.387	2.572	2.704	12.594
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3.324	1.607	2.387	2.572	2.704	12.594
4820	<i>Legislasi dan Ligitasi Pengawasan</i>	3.031	2.105	2.900	3.897	4.602	16.535
AAH	Peraturan Lainnya	-	166	903	1.840	2.484	5.393
EAG	Layanan Hukum	3.031	1.939	1.997	2.057	2.118	11.142
TOTAL		124.609	123.297	146.850	169.110	194.140	758.006

Secara rinci Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 disampaikan pada **Lampiran 3**.



BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada para APIP di Intansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Intern.

Berbagai tantangan perwujudan akuntabilitas melalui pengawasan intern yang dihadapi dalam penyelenggaraan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Investasi terhadap Skema Pendanaan, Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Penggunaan APBN yang tepat sasaran.

Dengan rancangan Sistem Program dan Kegiatan yang terukur, diharapkan Inspektorat Jenderal dapat berkontribusi terhadap perwujudan Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wakil Presiden.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

Renstra Inspektorat Jenderal periode 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Diharapkan setiap Unit Kerja dapat menyusun Rencana Strategis dan mengoperasionalkan program dan sasaran yang akan dilaksanakan secara terukur dengan mengacu pada dokumen ini.



Dengan rancangan program yang terukur tentunya Inspektorat Jenderal kedepannya dapat terus meningkatkan perannya menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi seluruh auditi atau mitra kerjanya melalui fokus utama pengawasan dalam pelaksanaan audit kinerja terhadap perwujudan prinsip *value for money* tanpa meninggalkan *compliance*, mengoptimalkan teknologi dalam proses pengawasan dan sebagai mitra yang selalu memberikan pemahaman tentang penganggaran yang berbasis kinerja dengan fokus pencapaian program prioritas melalui kesesuaian arsitektur kinerja di level program dan kegiatan.

5.3. MEKANISME EVALUASI

Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal periode 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku atau pada pertengahan Tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan di Tahun 2024.

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PAN-RB melalui Sekretariat Jenderal Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Lampiran 1. Matrik Kegiatan Prioritas Strategis Nasional di Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
I	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT				
A	Keperintisan Angkutan Jalan				
1	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan [C0007]	DKI Jakarta	Dit. Angkutan Jalan	965,00	0,00
B	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN				
2	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN (Major Project : MP10) [C0008]	Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim	Dit. Angkutan Jalan	0,00	1.597,00
C	Pembangunan Terminal				
3	Pembangunan Terminal Temajuk [C0015]	Kab. Sambas, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	50,00	0,00
4	Pembangunan Terminal Jagoibabang [C0013]	Kab. Bengkayang, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	50,00	0,00
5	Pembangunan Terminal Motaain [C0009]	Kab. Belu, NTT	BPTD Wilayah XIII	17,00	0,00
6	Pembangunan Terminal Wini [C0011]	Kab. Timor Tengah Utara, NTT	BPTD Wilayah XIII	25,16	0,00
7	Pembangunan Terminal Motamasin [C0010]	Kab. Malaka, NTT	BPTD Wilayah XIII	50,00	0,00
8	Pembangunan Terminal Aruk [C0012]	Kab. Sambas, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	76,00	0,00
9	Pembangunan Terminal Nanga Badau [C0014]	Kab. Kapuas Hulu, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	60,00	0,00
10	Pembangunan Terminal Skouw [C0016]	Kota Jayapura, Papua	BPTD Wilayah XXV	23,75	0,00
D	Pembangunan Kapal Penyeberangan				
11	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk. Dalam-Tk Bungus [C0063]	Kab. Asahan, Sumut	BPTD Wilayah II	30,00	0,00
12	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu [C0064]	Kab. Asahan, Sumut	BPTD Wilayah II	30,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
13	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai [C0065]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	BPTD Wilayah III	30,00	0,00
14	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai [C0947]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	BPTD Wilayah III	15,65	0,00
15	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-Matak-Penagi [C0067]	Kab. Bengkalis, Riau	BPTD Wilayah IV	30,00	0,00
16	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-Matak-Penagi [C0949]	Kab. Bengkalis, Riau	BPTD Wilayah IV	66,50	0,00
17	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung [C0066]	Kab. Kepulauan Meranti, Riau	BPTD Wilayah IV	30,00	0,00
18	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung [C0948]	Kab. Kepulauan Meranti, Riau	BPTD Wilayah IV	11,50	0,00
19	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-Sunyat [C0068]	Kab. Karimun, Kepri	BPTD Wilayah IV	30,00	0,00
20	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri Menanti-Krg Baru [C0069]	Kab. Banyuasin, Sumsel	BPTD Wilayah VII	30,00	0,00
21	Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI [C0070]	DKI Jakarta	Dit. Transportasi SDP	30,00	0,00
22	Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KTI [C0071]	DKI Jakarta	Dit. Transportasi SDP	30,00	0,00
23	Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI [C0950]	DKI Jakarta	Dit. Transportasi SDP	15,65	0,00
24	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-Kangean [C0072]	Kab. Sumenep, Jatim	BPTD Wilayah XI	30,00	0,00
25	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-Kangean [C0951]	Kab. Sumenep, Jatim	BPTD Wilayah XI	15,65	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
26	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-Kewapante [C0073]	Kab. Sikka, NTT	BPTD Wilayah XIII	30,00	0,00
27	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-Kewapante [C0952]	Kab. Sikka, NTT	BPTD Wilayah XIII	5,00	0,00
28	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete [C0074]	Kab. Sambas, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	30,00	0,00
29	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete [C0953]	Kab. Sambas, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	76,15	0,00
30	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau [C0075]	Kota Balikpapan, Kaltim	BPTD Wilayah XVII	30,00	0,00
31	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau [C0954]	Kota Balikpapan, Kaltim	BPTD Wilayah XVII	30,50	0,00
32	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P. Tanah Jamea [C0076]	Kab. Kepulauan Selayar, Sulsel	BPTD Wilayah XIX	29,99	0,00
33	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P. Tanah Jamea [C0955]	Kab. Kepulauan Selayar, Sulsel	BPTD Wilayah XIX	20,22	0,00
34	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising [C0077]	Kab. Bombana, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	30,00	0,00
35	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising [C0956]	Kab. Bombana, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	11,50	0,00
36	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko (Major Project : MP02) [C0078]	Kab. Wakatobi, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	30,00	0,00
37	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko [C0957]	Kab. Wakatobi, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	11,50	0,00
38	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Lamerang [C0079]	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	30,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
39	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Lamerang [C0958]	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	2,50	0,00
40	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-Kesui [C0081]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	29,99	0,00
41	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-Kesui [C0960]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	20,22	0,00
42	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa [C0080]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	30,00	0,00
43	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa [C0959]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	25,00	0,00
44	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-Gebe [C0084]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	30,00	0,00
45	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-Gebe [C0961]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	25,00	0,00
46	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Babang-P.Mandioli [C0082]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	30,00	0,00
47	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-Moti [C0083]	Kota Ternate, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	30,00	0,00
48	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa [C0085]	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	29,99	0,00
49	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa [C0962]	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	20,22	0,00
50	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahai-Foley-Arar [C0088]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	30,00	0,00
51	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-Pomako [C0086]	Kab. Kaimana, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	30,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
52	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Manokwari-Serui [C0087]	Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	30,00	0,00
E	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan				
53	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba (Major Project : MP02) [C0021]	Kab. Samosir, Sumut	BPTD Wilayah II	295,30	0,00
54	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo [C0022]	Kab. Nias Selatan, Sumut	BPTD Wilayah II	85,00	0,00
55	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan [C0023]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	BPTD Wilayah III	60,00	0,00
56	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabalu [C0024]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	BPTD Wilayah III	85,00	0,00
57	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih [C0026]	Kab. Bengkalis, Riau	BPTD Wilayah IV	60,00	0,00
58	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih [C0923]	Kab. Bengkalis, Riau	BPTD Wilayah IV	25,00	0,00
59	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung [C0027]	Kab. Indragiri Hilir, Riau	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
60	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung [C0029]	Kab. Indragiri Hilir, Riau	BPTD Wilayah IV	60,00	0,00
61	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal [C0025]	Kab. Kepulauan Meranti, Riau	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
62	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau [C0028]	Kab. Kepulauan Meranti, Riau	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
63	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung [C0030]	Kab. Anambas, Kepri	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
64	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan [C0031]	Kab. Anambas, Kepri	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
65	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa [C0032]	Kab. Anambas, Kepri	BPTD Wilayah IV	85,00	0,00
66	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Selu [C0034]	Kab. Belitung, Babel	BPTD Wilayah VII	60,00	0,00
67	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato) (Major Project : MP02) [C0035]	Kab. Belitung, Babel	BPTD Wilayah VII	85,00	0,00
68	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar (Major Project : MP02) [C0033]	Kab. Belitung Timur, Babel	BPTD Wilayah VII	60,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
69	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul [C0036]	Kab. Klungkung, Bali	BPTD Wilayah XII	85,00	0,00
70	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul [C0924]	Kab. Klungkung, Bali	BPTD Wilayah XII	32,50	0,00
71	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan [C0037]	Kab. Lombok Barat, NTB	BPTD Wilayah XII	85,00	0,00
72	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan [C0925]	Kab. Lombok Barat, NTB	BPTD Wilayah XII	13,00	0,00
73	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing [C0038]	Kab. Alor, NTT	BPTD Wilayah XIII	85,00	0,00
74	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang [C0039]	Kab. Lembata, NTT	BPTD Wilayah XIII	60,00	0,00
75	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata [C0040]	Kab. Sambas, Kalbar	BPTD Wilayah XIV	60,00	0,00
76	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang [C0042]	Kab. Banggai, Sulteng	BPTD Wilayah XX	85,00	0,00
77	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong [C0041]	Kab. Tojo Una-Una, Sulteng	BPTD Wilayah XX	85,00	0,00
78	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan [C0043]	Kab. Tojo Una-Una, Sulteng	BPTD Wilayah XX	60,00	0,00
79	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise [C0044]	Kota Palu, Sulteng	BPTD Wilayah XX	60,00	0,00
80	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu (Major Project : MP02) [C0051]	Kab. Buton, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	85,00	0,00
81	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko (Major Project : MP02) [C0045]	Kab. Wakatobi, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	85,00	0,00
82	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua (Major Project : MP02) [C0046]	Kab. Wakatobi, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	85,00	0,00
83	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia (Major Project : MP02) [C0047]	Kab. Wakatobi, Sultra	BPTD Wilayah XVIII	85,00	0,00
84	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio [C0048]	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	BPTD Wilayah XXII	60,00	0,00
85	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi [C0049]	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Sulut	BPTD Wilayah XXII	85,00	0,00
86	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen (Major Project : MP02) [C0050]	Kota Manado, Sulut	BPTD Wilayah XXII	85,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
87	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti [C0052]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	85,00	0,00
88	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata [C0053]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	85,00	0,00
89	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda [C0054]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	85,00	0,00
90	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta [C0055]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	85,00	0,00
91	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati (Major Project : MP02) [C0057]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	85,00	0,00
92	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati [C0927]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	37,46	0,00
93	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana [C0056]	Kab. Kaimana, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	85,00	0,00
94	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana [C0926]	Kab. Kaimana, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	23,45	0,00
95	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke [C0059]	Kab. Merauke, Papua	BPTD Wilayah XXV	85,00	0,00
96	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade [C0058]	Kab. Mappi, Papua	BPTD Wilayah XXV	85,00	0,00
97	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Sawaerma [C0060]	Kab. Asmat, Papua	BPTD Wilayah XXV	36,00	0,00
98	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren [C0061]	Kab. Waropen, Papua	BPTD Wilayah XXV	60,00	0,00
F	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan				
99	Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Padangbai [C0062]	Kab. Karangasem, Bali	BPTD Wilayah XII	0,00	255,00
100	Pengembangan Dermaga di Danau Batur [C0020]	Kab. Bangli, Bali	BPTD Wilayah XII	45,00	0,00
G	Subsidi Angkutan Perkotaan melalui skema Buy The Service				
101	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Medan [C0966]	Sumut	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
102	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Medan [C0119]	Kota Medan, Sumut	BPTD Wilayah II	170,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
103	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Pekanbaru [C0967]	Riau	Dit. Angkutan Jalan	150,00	0,00
104	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Batam [C0968]	Kepri	Dit. Angkutan Jalan	60,00	0,00
105	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Batam [C0120]	Kota Batam, Kepri	BPTD Wilayah IV	90,00	0,00
106	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Palembang [C0982]	Sumsel	BPTD Wilayah VII	80,00	0,00
107	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang [C0121]	Kota Palembang, Sumsel	BPTD Wilayah VII	170,00	0,00
108	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Maja [C0969]	Banten	Dit. Angkutan Jalan	30,00	0,00
109	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Bandung [C0970]	Jabar	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
110	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Bandung [C0122]	Kota Bandung, Jabar	BPTD Wilayah IX	120,00	0,00
111	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Salatiga [C0971]	Jateng	Dit. Angkutan Jalan	30,00	0,00
112	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Semarang [C0972]	Jateng	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
113	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Surakarta [C0973]	Jateng	Dit. Angkutan Jalan	250,00	0,00
114	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Semarang [C0123]	Kota Semarang, Jateng	BPTD Wilayah X	120,00	0,00
115	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Yogyakarta [C0974]	DIY	Dit. Angkutan Jalan	100,00	0,00
116	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Yogyakarta [C0124]	Kota Yogyakarta, DIY	BPTD Wilayah X	150,00	0,00
117	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Surabaya [C0975]	Jatim	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
118	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Surabaya [C0125]	Kota Surabaya, Jatim	BPTD Wilayah XI	120,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
119	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Denpasar [C0976]	Bali	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
120	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar [C0126]	Kota Denpasar, Bali	BPTD Wilayah XII	170,00	0,00
121	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Mataram [C0977]	NTB	Dit. Angkutan Jalan	100,00	0,00
122	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Singkawang [C0978]	Kalbar	Dit. Angkutan Jalan	30,00	0,00
123	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Banjarmasin [C0979]	Kalsel	Dit. Angkutan Jalan	60,00	0,00
124	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Banjarmasin [C0127]	Kota Banjarmasin, Kalsel	BPTD Wilayah XV	90,00	0,00
125	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Balikpapan [C0980]	Kaltim	Dit. Angkutan Jalan	50,00	0,00
126	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Tanjung Selor [C0128]	Kab. Bulungan, Kaltara	BPTD Wilayah XVII	30,00	0,00
127	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Makassar [C0981]	Sulsel	Dit. Angkutan Jalan	80,00	0,00
128	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Makassar [C0129]	Kota Makassar, Sulsel	BPTD Wilayah XIX	120,00	0,00
129	Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (buy the service) di Manado [C0983]	Sulut	Dit. Angkutan Jalan	40,00	0,00
130	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Manado [C0130]	Kota Manado, Sulut	BPTD Wilayah XXII	60,00	0,00
131	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sofifi [C0131]	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	30,00	0,00
132	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sorong [C0132]	Kota Sorong, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	60,00	0,00
H	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan				
133	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan [C0813]	Sumut	BPTD Wilayah II	25,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
134	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (Major Project : MP23) [C0002]	Kota Medan, Sumut	BPTD Wilayah II	125,00	1.000,00
135	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan [C0814]	Jabar	BPTD Wilayah IX	18,80	0,00
136	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (Major Project : MP23) [C0003]	Kota Bandung, Jabar	BPTD Wilayah IX	72,00	800,00
137	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Major Project : MP23) [C0004]	Kota Semarang, Jateng	BPTD Wilayah X	150,00	510,00
138	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Major Project : MP23) [C0005]	Kota Surabaya, Jatim	BPTD Wilayah XI	100,00	1.170,00
139	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan [C0815]	Sulsel	BPTD Wilayah XIX	3,50	0,00
140	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (Major Project : MP23) [C0006]	Kota Makassar, Sulsel	BPTD Wilayah XIX	150,00	510,00
141	Pengembangan Integrated Land Transport System di Banda Aceh [C0090]	Aceh	BPTD Wilayah I	15,00	0,00
142	Pengembangan Integrated Land Transport System di Padang [C0091]	Sumbar	BPTD Wilayah III	17,00	0,00
143	Pengembangan Integrated Land Transport System di Pekanbaru [C0092]	Riau	BPTD Wilayah IV	35,00	0,00
144	Pengembangan Integrated Land Transport System di Batam [C0093]	Kepri	BPTD Wilayah IV	35,00	0,00
145	Pengembangan Integrated Land Transport System di Bengkulu [C0094]	Bengkulu	BPTD Wilayah VI	15,00	0,00
146	Pengembangan Integrated Land Transport System di di Jambi [C0095]	Jambi	BPTD Wilayah V	18,50	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
147	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Palembang berbasis jalan [C0963]	Sumsel	BPTD Wilayah VII	46,70	0,00
148	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Palembang berbasis jalan (Major Project : MP09) [C0096]	Kota Palembang, Sumsel	BPTD Wilayah VII	50,00	0,00
149	Pengembangan Integrated Land Transport System di Belitung-KSPN Tanjung Kelayang [C0097]	Babel	BPTD Wilayah VII	25,00	0,00
150	Pengembangan Integrated Land Transport System di Bandar Lampung [C0098]	Lampung	BPTD Wilayah VI	15,00	0,00
151	Pengembangan Integrated Land Transport System di Maja [C0099]	Banten	BPTD Wilayah VIII	10,00	0,00
152	Pengembangan Integrated Land Transport System di Salatiga [C0100]	Jateng	BPTD Wilayah X	12,50	0,00
153	Pengembangan Integrated Land Transport System di Surakarta [C0101]	Jateng	BPTD Wilayah X	37,50	0,00
154	Pengembangan Integrated Land Transport System di Yogyakarta-KSPN Borobudur [C0102]	DIY	BPTD Wilayah X	38,00	0,00
155	Pengembangan Integrated Land Transport System di Malang [C0103]	Jatim	BPTD Wilayah XI	12,30	0,00
156	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Denpasar berbasis jalan [C0964]	Bali	BPTD Wilayah XII	92,00	0,00
157	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Denpasar berbasis jalan (Major Project : MP09) [C0104]	Kota Denpasar, Bali	BPTD Wilayah XII	50,00	0,00
158	Pengembangan Integrated Land Transport System di Mataram-KSPN Mandalika [C0105]	NTB	BPTD Wilayah XII	41,70	0,00
159	Pengembangan Integrated Land Transport System di Singkawang [C0106]	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	15,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
160	Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Banjarmasin Berbasis Jalan [C0965]	Kalsel	BPTD Wilayah XV	103,00	0,00
161	Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Banjarmasin Berbasis Jalan (Major Project : MP09) [C0107]	Kota Banjarmasin, Kalsel	BPTD Wilayah XV	50,00	0,00
162	Pengembangan Integrated Land Transport System di Palangkaraya [C0108]	Kalteng	BPTD Wilayah XVI	12,50	0,00
163	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kalimantan Timur [C0109]	Kaltim	BPTD Wilayah XVII	50,00	0,00
164	Pengembangan Integrated Land Transport System di Balikpapan [C0110]	Kaltim	BPTD Wilayah XVII	25,00	0,00
165	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Tanjung Selor berbasis jalan (Major Project : MP11) [C0111]	Kab. Bulungan, Kaltara	BPTD Wilayah XVII	50,00	0,00
166	Pengembangan Integrated Land Transport System di Palu [C0112]	Sulteng	BPTD Wilayah XX	18,50	0,00
167	Pengembangan Integrated Land Transport System di di Kendari [C0113]	Sultra	BPTD Wilayah XVIII	18,50	0,00
168	Pengembangan Integrated Land Transport System di Gorontalo [C0114]	Gorontalo	BPTD Wilayah XXI	18,00	0,00
169	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Manado berbasis jalan yang dikembangkan [C0115]	Kota Manado, Sulut	BPTD Wilayah XXII	50,00	0,00
170	Pengembangan Integrated Land Transport System di Ambon [C0116]	Maluku	BPTD Wilayah XXIII	15,00	0,00
171	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sofifi berbasis jalan yang dikembangkan (Major Project : MP11) [C0117]	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	50,00	0,00
172	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sorong berbasis jalan yang dikembangkan (Major Project : MP11) [C0118]	Kota Sorong, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	50,00	0,00
I	Perlengkapan Jalan				
173	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan [C0001]	DKI Jakarta	Dit. Lalu Lintas Jalan	7.500,00	0,00
J	Prasarana Alat Uji Kendaraan Bermotor				
174	Pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi [C0017]	Kab. Bekasi, Jabar	BPLJSKB Bekasi	295,00	1.750,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
II	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN				
A	Pembangunan Jalur KA				
175	Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhoksemawe) : Bireun - Lhokseumawe [F0009]	Kota Banda Aceh, Aceh	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	458,60	0,00
176	Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei Liput - Langsa - Lhokseumawe) : Besitang - Sei Liput [F0010]	Kota Lhokseumawe, Aceh	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	300,00	0,00
177	Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei Liput - Langsa - Lhokseumawe) : Sei Liput - Langsa [F0011]	Kota Lhokseumawe, Aceh	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	750,00	0,00
178	Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru) : Batas Sumut - Duri [F0013]	Kab. Labuhanbatu, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	415,00	0,00
179	Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru) : Pondok S2 - Kota Pinang [F0014]	Kab. Labuhanbatu, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	200,00	0,00
180	Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru) : Rantau Prapat - Pondok S2 [F0015]	Kab. Labuhanbatu, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	390,00	0,00
181	Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Major Project : MP02) [F0012]	Kota Pematangsiantar, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	305,00	1.105,00
182	Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru) : Kota Pinang - Batas Sumut [F0016]	Kota Pekanbaru, Riau	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	210,00	0,00
183	Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu [F0017]	Kab. Rejang Lebong, Bengkulu	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	0,00	207,80



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
184	Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api [F0018]	Kab. Muara Enim, Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	0,00	700,00
185	Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi) : Palembang - Betung [F0020]	Kab. Muara Enim, Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	275,00	0,00
186	Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi) : Betung - Jambi [F0019]	Kab. Banyuasin, Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	275,00	0,00
187	Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak [F0023]	Kab. Lebak, Banten	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	800,00	0,00
188	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (Major Project : MP20) [F0069]	DKI Jakarta	Dit. Prasarana Perkeretaapian	0,00	42.000,00
189	Pembangunan KA Berkecepatan Tinggi Jakarta - Semarang (Major Project : MP20) [F0070]	DKI Jakarta	Dit. Prasarana Perkeretaapian	16.255,00	0,00
190	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar) : Cikampek - Padalarang [F0028]	Kab. Karawang, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	565,00	0,00
191	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar) : Cicalengka - Banjar [F0027]	Kab. Bandung, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	673,40	0,00
192	Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka (Major Project : MP23) [F0025]	Kota Bandung, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	1.000,00	0,00
193	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar) : Bogor - Sukabumi [F0026]	Kota Sukabumi, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	1.768,88	0,00
194	Perkeretaapian Jabodetabek (Major Project : MP23) [F0071]	Kota Bekasi, Jabar	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	2.040,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
195	Pembangunan Jalur Ganda Banjar - Kroya [F0029]	Kab. Cilacap, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	500,00	0,00
196	Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang) : Mojokerto - Jombang [F0034]	Kab. Jombang, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	460,00	0,00
197	Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang) : Wonokromo - Mojokerto [F0035]	Kota Surabaya, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	750,00	0,00
198	Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja [F0037]	Kab. Badung, Bali	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	325,00	2.770,00
199	Pembangunan KA Barang Kalimantan (Gunung Mas - Katingan) (Major Project : MP03) [F0038]	Kab. Murung Raya, Kalteng	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	0,00	1.400,00
200	Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung) (Major Project : MP03) [F0039]	Kab. Murung Raya, Kalteng	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	0,00	1.601,44
201	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian di IKN (Major Project : MP10) [F0040]	Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	0,00	34.086,00
202	Pembangunan Jalur KA Trans Kalimantan (Balikpapan - Samarinda) [F0041]	Kota Balikpapan, Kaltim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	0,00	450,00
203	Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare : (Palanro - Parepare; Mandai - Makassar) (Major Project : MP21) [F0042]	Kota Makassar, Sulsel	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	3.789,30	0,00
204	Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare : (Pangkep - Maros) (Major Project : MP21) [F0043]	Kota Makassar, Sulsel	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	0,00	2.638,70
B	Pembangunan Jalur KA Akses Bandara				
205	Pembangunan KA akses Bandara Raden Inten II [F0021]	Kab. Lampung Selatan, Lampung	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	74,70	0,00
206	Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo (Major Project : MP02) [F0030]	Kota Surakarta, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	240,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
207	Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta (Major Project : MP02) [F0032]	Kab. Kulonprogo, DIY	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	800,00	0,00
208	Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda (Major Project : MP02) [F0033]	Kab. Sidoarjo, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	300,00	0,00
C	Pembangunan Jalur KA Akses Pelabuhan				
209	Pembangunan KA akses Pelabuhan Tarahan [F0022]	Kab. Lampung Selatan, Lampung	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	0,00	500,00
210	Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas (Major Project : MP02) [F0031]	Kota Semarang, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	7,50	0,00
211	Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong [F0036]	Kota Surabaya, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	200,00	0,00
212	Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong [F0044]	Kab. Barru, Sulsel	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	500,00	0,00
D	Reaktivasi Jalur KA				
213	Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau [F0053]	Kota Pariaman, Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	550,00	0,00
214	Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah) [F0054]	Kab. Lebak, Banten	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	900,00	0,00
215	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey):Cibatu-Garut-Cikajang [F0055]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	0,00	450,00
216	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey):Cikudapateh-Ciwidey [F0056]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	0,00	260,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
217	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey):Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari [F0057]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	1.010,00	0,00
218	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey): Banjar - Cijulang [F0058]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	0,00	300,00
219	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) : Cianjur-Padalarang [F0333]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	550,00	0,00
220	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) [F0332]	Kab. Cianjur, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	550,00	0,00
E	Subsidi Perintis KA				
221	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Aceh: Cut Meuthia Lintas Kr. Mane - Kr. Geukeuh [F0001]	Aceh	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	122,10	0,00
222	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Utara: Medan - Pondok S2 [F0002]	Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	148,51	0,00
223	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Utara: Medan - Sei Liput [F0003]	Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	141,55	0,00
224	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : Bandara Internasional Minangkabau [F0004]	Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	128,21	0,00
225	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : Lembah Anai (Lubuk Alung - Kayu Tanam) [F0005]	Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	85,47	0,00
226	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : Padang - Pulo Aer [F0006]	Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	58,90	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
227	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : Kertalaya [F0007]	Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	26,88	0,00
228	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : LRT Sumatera Selatan [F0067]	Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	1.054,55	0,00
229	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sumatera Barat : Bethara Kresna [F0008]	Kota Semarang, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	65,48	0,00
230	Penyelenggaraan Subsidi Perintis KA Sulawesi Selatan: Makassar - Parepare [F0068]	Sulsel	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA	73,26	0,00
F	Peningkatan / Pengembangan Jalur KA				
231	Peningkatan Jalur KA di Sumatera Utara (Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar) [F0045]	Kab. Deliserdang, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	1.456,23	0,00
232	Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang) (Major Project : MP23) [F0072]	Kota Medan, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	244,30	0,00
233	Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang- Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal) [F0046]	Kota Pariaman, Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	1.017,10	0,00
234	Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk Linggau) [F0047]	Kab. Lahat, Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	438,83	0,00
235	Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak) [F0048]	Kab. Lebak, Banten	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	676,38	0,00
236	KA Outer Jabodetabek (Major Project : MP23) [F0074]	DKI Jakarta	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	500,00	0,00
237	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar) [F0049]	Kota Bandung, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	209,60	0,00
238	Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya): Semarang - Solo (Major Project : MP02) [F0050]	Kota Semarang, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	699,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
239	Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo (Major Project : MP02) [F0051]	Kota Yogyakarta, DIY	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	600,00	0,00
240	Peningkatan Jalur KA Lintas Bangil Kertosono Segmen Malang Sumber Pucung (13,1 KM'SP) [F0334]	Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	73,29	0,00
241	Peningkatan jalur KA SBY-BWI segmen Bangil-Probolinggo (34 Km'SP) [F0335]	Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	185,04	0,00
242	Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono) (Major Project : MP02) [F0052]	Kota Surabaya, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	908,20	0,00
G	Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian				
243	Restrukturisasi Emplasment Pucuk dan Pembangunan Overcapping Stasiun Lamongan [F0336]	Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	4,37	0,00
H	Peningkatan / Pengembangan Jalur KA				
244	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement (PHLN) [F0186]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	1,00	0,00
245	Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertokusila (Major Project : MP23) [F0080]	Kota Surabaya, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	1.000,00	0,00
I	Peningkatan / Pengembangan Jalur KA				
246	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0073]	Kota Medan, Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	3.000,00	2.000,00
247	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0075]	DKI Jakarta	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	1.670,00	55.950,00
248	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Kota Lainnya [F0076]	DKI Jakarta	Dit. Prasarana Perkeretaapian	400,00	0,00
249	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0077]	Kota Bandung, Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	3.390,00	1.998,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
250	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0078]	Kota Semarang, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	1.500,00	1.810,00
251	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0079]	Kota Surabaya, Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	1.710,00	336,00
252	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan berbasis rel di Ibu Kota Negara [F0081]	Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	454,70	0,00
253	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (Major Project : MP23) [F0082]	Kota Makassar, Sulsel	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	1.000,00	1.000,00
J	Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Perlintasan Sebidang KA dengan Jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian				
254	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara [F0060]	Sumut	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	148,97	0,00
255	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Sumatera Bagian Barat [F0061]	Sumbar	BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	105,12	0,00
256	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan [F0062]	Sumsel	BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan	210,22	0,00
257	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Jakarta dan Banten [F0063]	Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	BTP Wilayah Jakarta dan Banten	210,23	0,00
258	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Jawa Bagian Barat [F0064]	Jabar	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	105,12	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
259	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah [F0065]	Kota Semarang, Jateng	BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah	210,22	0,00
260	Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Jawa Bagian Timur [F0066]	Jatim	BTP Wilayah Jawa Bagian Timur	105,12	0,00
K	Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO)				
261	Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api (IMO) [F0059]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Prasarana Perkeretaapian	7.500,00	0,00
III	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT				
A	Pengembangan Sistem Inaportnet dan Sistem Pelayanan Terpadu				
262	Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (RPJMN) [D0040]	DKI Jakarta	Dit. Lalu Lintas Angkutan Laut	1.332,00	0,00
B	Penyelenggaraan Angkutan Kapal Ternak				
263	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak di Belu (RPJMN) [D0041]	Kab. Belu, NTT	Dit. Lalu Lintas Angkutan Laut	38,50	0,00
C	Penyelenggaraan Tol Laut				
264	Penyelenggaraan Tol Laut dengan mekanisme Penugasan dan Swasta (RPJMN) [D0042]	DKI Jakarta	Dit. Lalu Lintas Angkutan Laut	2.398,00	0,00
D	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Swasta dan PELNI				
265	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0063]	Kab. Aceh Barat, Aceh	UPP Calang	86,23	0,00
266	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0043]	Kota Padang, Sumbar	KSOP Teluk Bayur	77,88	0,00
267	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0044]	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Dit. Lalu Lintas Angkutan Laut	1.396,45	0,00
268	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0046]	Kab. Cilacap, Jateng	KSOP Cilacap	112,25	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
269	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0045]	Kota Semarang, Jateng	KSOP Tanjung Emas	198,84	0,00
270	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0047]	Kota Surabaya, Jatim	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak	55,93	0,00
271	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0048]	Kota Bima, NTB	KSOP Bima	346,05	0,00
272	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0051]	Kab. Kupang, NTT	KSOP Kupang	135,21	0,00
273	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0049]	Kab. Sikka, NTT	KSOP Laurentius Say	283,80	0,00
274	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0050]	Kab. Sumba Timur, NTT	KSOP Waingapu	205,14	0,00
275	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0053]	Kab. Sambas, Kalbar	KSOP Sintete	57,36	0,00
276	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0052]	Kota Pontianak, Kalbar	KSOP Pontianak	96,88	0,00
277	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0054]	Kota Tarakan, Kaltara	KSOP Tarakan	70,35	0,00
278	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0055]	Kab. Mamuju, Sulbar	UPP Mamuju	66,51	0,00
279	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0057]	Kab. Toli-Toli, Sulteng	UPP Poso	179,01	0,00
280	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0059]	Kab. Banggai, Sulteng	UPP Pagimana	72,45	0,00
281	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0058]	Kab. Morowali, Sulteng	UPP Kolonedale	89,40	0,00
282	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0056]	Kota Palu, Sulteng	KSOP Teluk Palu	179,85	0,00
283	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0060]	Kota Kendari, Sultra	KSOP Kendari	308,59	0,00
284	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0062]	Kab. Boalemo, Gorontalo	UPP Tilamuta	77,85	0,00
285	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0061]	Kota Gorontalo, Gorontalo	KSOP Gorontalo	74,49	0,00
286	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0066]	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual	471,77	0,00
287	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0065]	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki	417,30	0,00
288	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0064]	Kota Ambon, Maluku	KSOP Ambon	218,82	0,00
289	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0068]	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Kantor UPP Babang	150,87	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
290	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0069]	Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara	UPP Sanana	173,88	0,00
291	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0067]	Kota Ternate, Maluku Utara	KSOP Ternate	111,53	0,00
292	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0070]	Kab. Manokwari, Papua Barat	KSOP Manokwari	44,89	0,00
293	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0071]	Kota Sorong, Papua Barat	KSOP Sorong	343,59	0,00
294	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0072]	Kab. Jayapura, Papua	KSOP Jayapura	112,02	0,00
295	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0073]	Kab. Biak-Numfor, Papua	KSOP Biak	50,77	0,00
296	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis (RPJMN) [D0074]	Kab. Merauke, Papua	KSOP Merauke	232,94	0,00
E	Pembangunan Pelabuhan				
297	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Labuhan Bajau (RPJMN) [D0077]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumba	UPP Muara Siberut	42,00	0,00
298	Pembangunan Baru Pelabuhan Teluk Sasah (RPJMN) [D0088]	Kab. Bintan, Kepri	KSOP Kijang	36,30	0,00
299	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Dompok (RPJMN) [D0150]	Kota Tanjung Pinang, Kepri	KSOP Tanjung Pinang	50,00	0,00
300	Pembangunan Baru Tanjung Ular (RPJMN) [D0091]	Kab. Bangka, Babel	KSOP Muntok	2,50	0,00
301	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Patimban (dari Pelabuhan Baru) (PHLN) (RPJMN) [D0079]	Kab. Subang, Jabar	KSOP Patimban	4.832,21	0,00
302	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan (Major Project : MP03) [D0081]	Kab. Bangkalan, Jatim	Dit. Kepelabuhanan	0,00	600,00
303	Pembangunan Baru Pelabuhan Kilo (RPJMN) [D0096]	Kab. Dompu, NTB	UPP Sape	25,00	0,00
304	Pengembangan Pelabuhan baru di NTT [D0101]	NTT	Dit. Kepelabuhanan	0,00	400,00
305	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Selor (RPJMN) [D0083]	Kab. Bulungan, Kaltara	UPP Pulau Bunyu	35,00	0,00
306	Pembangunan Baru Pelabuhan Bunyu (RPJMN) [D0114]	Kab. Bulungan, Kaltara	UPP Pulau Bunyu	90,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
307	Pengembangan Pelabuhan baru di Ambon [D0131]	Kota Ambon, Maluku	Dit. Kepelabuhanan	0,00	560,00
308	Pembangunan Baru Gane Dalam (RPJMN) [D0134]	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Kantor UPP Babang	26,00	0,00
F	Pengembangan Pelabuhan				
309	Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (Major Project : MP03, MP22) [D3523]	Kab. Batubara, Sumut	Dit. Kepelabuhanan	0,00	25.000,00
310	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Meranti (RPJMN) [D0084]	Kab. Bengkalis, Riau	KSOP Selat Panjang	3,11	0,00
311	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar (BUMN) (RPJMN) (Major Project : MP08) [D0075]	Kota Batam, Kepri	Kantor Pelabuhan Batam	0,00	90,00
312	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Batu Kundur (RPJMN) [D0086]	Kota Batam, Kepri	KSOP Tanjung Balai Karimun	25,00	0,00
313	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Malarko (RPJMN) [D0087]	Kota Batam, Kepri	KSOP Tanjung Balai Karimun	90,00	0,00
314	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan(KDP) Pelabuhan Tg. Mochi (RPJMN) [D0085]	Kota Tanjung Pinang, Kepri	KSOP Tanjung Pinang	75,00	0,00
315	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Ujung Jabung (RPJMN) [D0078]	Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi	UPP Nipah Panjang	80,00	0,00
316	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api [D0089]	Kab. Banyuasin, Sumsel	Dit. Kepelabuhanan	0,00	1.000,00
317	Lanjutan dan Penyelesaian Tanjung Ular (RPJMN) [D0090]	Kab. Bangka, Babel	KSOP Muntok	97,50	0,00
318	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Mesuji (RPJMN) [D0092]	Kab. Tulang Bawang, Lampung	UPP Mesuji	90,00	0,00
319	Pengadaan peralatan bongkar muat [D3524]	DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	0,00	2.500,00
320	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Major Project : MP22) [D3525]	DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	0,00	5.000,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
321	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tegal (BUMN) (RPJMN) [D0080]	Kab. Tegal, Jateng	KSOP Tegal	0,00	140,00
322	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kendal (RPJMN) [D0151]	Kota Semarang, Jateng	KSOP Tanjung Emas	90,00	0,00
323	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas (Major Project : MP02) [D3526]	Kota Semarang, Jateng	Dit. Kepelabuhanan	0,00	10.000,00
324	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak (Major Project : MP22) [D3527]	Kota Surabaya, Jatim	Dit. Kepelabuhanan	0,00	5.500,00
325	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Tanah Ampo (RPJMN) [D0093]	Kab. Karangasem, Bali	KSOP Padang Bai	90,00	0,00
326	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Major Project : MP02) [D3529]	Kab. Badung, Bali	Dit. Kepelabuhanan	0,00	184,00
327	Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali (Major Project : MP09) [D0094]	Kota Denpasar, Bali	Dit. Kepelabuhanan	0,00	150,00
328	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan (RPJMN) (Major Project : MP02) [D0097]	Kab. Lombok Barat, NTB	Kantor UPP Pemenang	150,00	0,00
329	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Kilo (RPJMN) [D0095]	Kab. Dompu, NTB	UPP Sape	25,00	0,00
330	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Raijua (RPJMN) [D0104]	Kab. Kupang, NTT	UPP Seba	22,50	0,00
331	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Seba (RPJMN) [D0105]	Kab. Kupang, NTT	UPP Seba	108,38	0,00
332	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Larantuka (RPJMN) [D0098]	Kab. Flores Timur, NTT	UPP Larantuka	45,00	0,00
333	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Terminal Labuhan Bajo (RPJMN) [D0082]	Kab. Manggarai, NTT	UPP Labuhan Bajo	90,00	0,00
334	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kedindi Reo (RPJMN) [D0100]	Kab. Manggarai, NTT	UPP Reo	15,50	0,00
335	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ba'a (RPJMN) [D0103]	Kab. Rote Ndao, NTT	UPP Ba'a	33,75	0,00
336	Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) (Major Project : MP02) [D0106]	Kab. Manggarai Barat, NTT	UPP Labuhan Bajo	0,00	28,50
337	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Wini (RPJMN) [D0099]	Kota Kupang, NTT	UPP Atapupu	45,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
338	Pengembangan Pelabuhan Kijing (Major Project : MP22) [D3530]	Kab. Mempawah, Kalbar	Dit. Kepelabuhanan	0,00	12.500,00
339	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pelaihari (RPJMN) [D0109]	Kab. Tanah Laut, Kalsel	Kantor UPP Kintap	11,25	0,00
340	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sebuku (RPJMN) [D0107]	Kab. Kotabaru, Kalsel	KSOP Kotabaru - Batulicin	50,00	0,00
341	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Maloy (RPJMN) [D0112]	Kab. Kutai Timur, Kaltim	UPP Tanjung Santan	40,50	0,00
342	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Palaran (Samarinda) (RPJMN) [D0110]	Kota Samarinda, Kaltim	KSOP Samarinda	100,00	0,00
343	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kariangau (BUMN) (RPJMN) [D0111]	Kota Balikpapan, Kaltim	KSOP Balikpapan	0,00	100,00
344	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Selor (RPJMN) [D0148]	Kab. Bulungan, Kaltara	UPP Pulau Bunyu	35,00	0,00
345	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bajoe (RPJMN) [D0115]	Kab. Bone, Sulsel	UPP Bajoe	5,00	0,00
346	Pengembangan Pelabuhan Makassar (Major Project : MP22) [D3531]	Kota Makassar, Sulsel	Dit. Kepelabuhanan	0,00	10.000,00
347	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Belang-belang (RPJMN) [D0118]	Kab. Mamuju, Sulbar	UPP Belang-Belang	90,00	0,00
348	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Mansalean (RPJMN) [D0119]	Kab. Banggai Kepulauan, Sulteng	UPP Banggai	14,03	0,00
349	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Banggai (RPJMN) [D0152]	Kab. Banggai Kepulauan, Sulteng	UPP Banggai	90,00	0,00
350	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kaledupa (RPJMN) (Major Project : MP02) [D0120]	Kab. Wakatobi, Sultra	Kantor UPP Wanci	5,00	0,00
351	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Wanci (RPJMN) (Major Project : MP02) [D0121]	Kab. Wakatobi, Sultra	Kantor UPP Wanci	65,50	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
352	Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau (Major Project : MP08) [D0123]	Kota Bau-Bau, Sultra	UPP Bau - Bau	0,00	244,32
353	Pengembangan Pelabuhan Anggrek (Major Project : MP08) [D0124]	Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo	Dit. Kepelabuhanan	0,00	259,57
354	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tahuna (RPJMN) [D0125]	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	UPP Tahuna	22,50	0,00
355	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Likupang (RPJMN) (Major Project : MP02) [D0127]	Kab. Minahasa Utara, Sulut	UPP Likupang	7,50	0,00
356	Pengembangan Pelabuhan Bitung (Major Project : MP22) [D3532]	Kota Bitung, Sulut	Dit. Kepelabuhanan	0,00	25.000,00
357	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tual (RPJMN) [D0153]	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual	45,00	0,00
358	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Saumlaki (RPJMN) [D0128]	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki	67,50	0,00
359	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Namlea (RPJMN) [D0130]	Kab. Pulau Buru, Maluku	UPP Namlea	25,00	0,00
360	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dobo (RPJMN) [D0154]	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	UPP Dobo	90,00	0,00
361	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dobo [D0449]	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	UPP Dobo	30,26	0,00
362	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gorom (RPJMN) [D0132]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	UPP Geser	22,50	0,00
363	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Geser (RPJMN) [D0155]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	UPP Geser	25,00	0,00
364	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tobelo (RPJMN) [D0149]	Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara	UPP Tobelo	90,00	0,00
365	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Soasio (RPJMN) [D0117]	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	UPP Soa-Siu	37,50	0,00
366	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kaimana (RPJMN) [D0135]	Kab. Fak Fak, Papua Barat	UPP Kaimana	78,28	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
367	Pengembangan Pelabuhan Sorong (Major Project : MP02, MP22) [D3533]	Kota Sorong, Papua Barat	Dit. Kepelabuhanan	0,00	30.000,00
368	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Depapre (RPJMN) [D0137]	Kab. Jayapura, Papua	KSOP Jayapura	50,00	0,00
369	Pengembangan Pelabuhan Serui [D0139]	Kab. Kepulauan Yapen, Papua	UPP Serui	0,00	64,97
370	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Merauke (BUMN) (RPJMN) [D0076]	Kab. Merauke, Papua	KSOP Merauke	0,00	45,00
371	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nabire (RPJMN) [D0140]	Kab. Nabire, Papua	UPP Nabire	39,04	0,00
372	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pomako (RPJMN) [D0143]	Kab. Mimika, Papua	UPP Pomako I/Pomako II	90,00	0,00
373	Lanjutan dan Penyelesaian Pelabuhan Moor (RPJMN) [D0142]	Kab. Mappi, Papua	UPP Bade	11,50	0,00
G	Rehabilitasi Pelabuhan				
374	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Pantoloan (RPJMN) (Major Project : MP03) [D0145]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	1.044,00	0,00
375	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Waikelo (RPJMN) [D0102]	Kab. Sumba Barat Daya, NTT	UPP Waikelo	1,00	0,00
376	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Jampea (RPJMN) [D0116]	Kab. Kepulauan Selayar, Sulsel	UPP Jampea	23,54	0,00
377	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Wanci (RPJMN) (Major Project : MP02) [D0122]	Kab. Wakatobi, Sultra	Kantor UPP Wanci	24,50	0,00
378	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Miangas (RPJMN) [D0126]	Kab. Kepulauan Talaud, Sulut	Kantor UPP Melonguane	26,21	0,00
379	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Molu (RPJMN) [D0129]	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki	16,85	0,00
380	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Moa (RPJMN) [D0133]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	UPP Wonreli	20,54	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
381	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Wasior (RPJMN) [D0136]	Kab. Manokwari, Papua Barat	UPP Wasior	5,50	0,00
382	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi (RPJMN) [D0141]	Kab. Jayapura, Papua	UPP Sarmi	38,40	0,00
H	Pengerukan Alur Pelayaran				
383	lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi) (RPJMN) [D0147]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	572,42	0,00
I	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN				
384	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN (Major Project : MP10) [D0113]	Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim	Dit. Kepelabuhanan	0,00	1.075,00
J	Pengadaan Kapal Kenavigasian				
385	Penyediaan kapal navigasi (RPJMN) [D0039]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kenavigasian	1.000,00	0,00
IV	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA				
A	Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Penumpang Udara Perintis				
386	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Manokwari (Major Project : MP29) [E0092]	Kab. Manokwari, Papua Barat	Bandara Rendani	130,69	0,00
387	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Sorong (Major Project : MP29) [E0093]	Kota Sorong, Papua Barat	Bandara Domine Eduard Osok	52,28	0,00
388	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Merauke (Major Project : MP29) [E0094]	Kab. Merauke, Papua	Bandara Mopah	236,74	0,00
389	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Wamena (Major Project : MP29) [E0095]	Kab. Jayawijaya, Papua	Bandara Wamena	135,77	0,00
390	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Nabire (Major Project : MP29) [E0096]	Kab. Nabire, Papua	Kantor UPBU Douw Aturure	138,47	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
391	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Timika (Major Project : MP29) [E0100]	Kab. Mimika, Papua	Bandara Mozes Kilangin	296,43	0,00
392	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Tanah Merah (Major Project : MP29) [E0097]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	86,01	0,00
393	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Dekai (Major Project : MP29) [E0099]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	82,04	0,00
394	Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Udara Perintis di Yalimo (Major Project : MP29) [E0098]	Yalimo, Papua	Kantor UPBU Elelim	170,56	0,00
B	Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Kargo Udara Perintis				
395	Penyelenggaraan Angkutan Kargo Perintis di Timika (Major Project : MP29) [E0101]	Kab. Mimika, Papua	Bandara Mozes Kilangin	153,91	0,00
C	Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Kargo Udara				
396	Penyelenggaraan Angkutan Kargo di Timika (Major Project : MP29) [E0104]	Kab. Mimika, Papua	Bandara Mozes Kilangin	78,73	0,00
397	Penyelenggaraan Angkutan Kargo di Tanah Merah (Major Project : MP29) [E0102]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	120,93	0,00
398	Penyelenggaraan Angkutan Kargo di Dekai (Major Project : MP29) [E0103]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	89,90	0,00
D	Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan BBM Penumpang Udara Perintis				
399	Penyelenggaraan Angkutan BBM Udara Perintis di Merauke (Major Project : MP29) [E0105]	Kab. Merauke, Papua	Bandara Mopah	23,89	0,00
400	Penyelenggaraan Angkutan BBM Udara Perintis di Wamena (Major Project : MP29) [E0106]	Kab. Jayawijaya, Papua	Bandara Wamena	58,44	0,00
401	Penyelenggaraan Angkutan BBM Udara Perintis di Tanah Merah (Major Project : MP29) [E0107]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	41,55	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
402	Penyelenggaraan Angkutan BBM Udara Perintis di Dekai (Major Project : MP29) [E0108]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	27,74	0,00
E	Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan BBM Kargo Udara Perintis				
403	Penyelenggaraan Angkutan BBM Kargo Udara Perintis di Dekai (Major Project : MP29) [E0109]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	16,01	0,00
F	Pembangunan Bandar Udara				
404	Pembangunan Bandara Labuan Batu [E0002]	Kab. Labuhanbatu, Sumut	Dit. Bandar Udara	700,00	0,00
405	Pembangunan Bandara Bukit Malintang [E0001]	Kab. Mandailing Natal, Sumut	Dit. Bandar Udara	250,00	0,00
406	Pembangunan Bandara Sukabumi [E0005]	Kab. Sukabumi, Jabar	Dit. Bandar Udara	400,00	0,00
407	Pembangunan Bandara Ngloram - Cepu [E0006]	Kab. Blora, Jateng	Dit. Bandar Udara	352,60	0,00
408	Pembangunan Bandara Kediri-Jatim [E0007]	Kab. Kediri, Jatim	Dit. Bandar Udara	0,00	600,00
409	Pembangunan Bandara Bali Baru (Major Project : MP02) [E0009]	Kab. Buleleng, Bali	Dit. Bandar Udara	1.500,00	0,00
410	Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara (Major Project : MP03) [E0010]	Kab. Kayong Utara, Kalbar	Dit. Bandar Udara	250,00	0,00
411	Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar [E0011]	Kota Singkawang, Kalbar	Dit. Bandar Udara	0,00	1.000,00
412	Pembangunan Bandara Murung Raya-Kalteng [E0012]	Kab. Murung Raya, Kalteng	Bandara Beringin	297,40	0,00
413	Pembangunan Bandara Buntu Kunik [E0013]	Kab. Tanatoraja, Sulsel	Bandara Pongtiku	131,10	0,00
414	Pembangunan Bandara Buntu Kunik [E2593]	Kab. Tanatoraja, Sulsel	Bandara Pongtiku	0,00	0,00
415	Pembangunan Bandara Banggai Laut [E0014]	Kab. Banggai Laut, Sulteng	Kantor UPBU Tojo Una Una	510,00	0,00
416	Pembangunan Bandara Kolaka Utara [E0015]	Kab. Kolaka, Sultra	Kantor UPBU Sangia Ni Bandera	650,00	0,00
417	Pembangunan Bandara Pahuwato [E0016]	Kab. Pahuwato, Gorontalo	Bandara Jalaludin	265,00	0,00
418	Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow [E0017]	Kab. Bolaang Mongondow, Sulut	Bandara Naha	463,10	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
419	Pembangunan Bandara Gorom [E0018]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	Dit. Bandar Udara	550,00	0,00
420	Pembangunan Bandara Weda (Major Project : MP03) [E0020]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Dit. Bandar Udara	220,00	0,00
421	Pembangunan Bandara Siboru [E0110]	Kab. Fak Fak, Papua Barat	Bandara Torea	1.138,53	0,00
422	Pembangunan Bandara Wasior Baru (Major Project : MP12) [E0113]	Kab. Teluk Wondama, Papua Barat	Dit. Bandar Udara	600,00	0,00
423	Pembangunan Bandara Nabire Baru [E0114]	Kab. Nabire, Papua	Kantor UPBU Douw Aturure	941,19	0,00
424	Pembangunan Bandara Manokwari Selatan (Major Project : MP12) [E0116]	Kab. Mimika, Papua	Dit. Bandar Udara	600,00	0,00
425	Pembangunan Bandara Sobaham [E0115]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	380,00	0,00
G	Pembangunan Bandar Udara Perairan				
426	Pembangunan Bandara Perairan Pulau Senua [E0004]	Kab. Natuna, Kepri	Dit. Bandar Udara	35,00	0,00
427	Pembangunan Bandara Perairan Pulau Bawah [E0003]	Kab. Anambas, Kepri	Dit. Bandar Udara	30,00	0,00
428	Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyang [E0008]	Kab. Sumenep, Jatim	Dit. Bandar Udara	25,00	0,00
429	Pembangunan Bandara Perairan Pulau Widi [E0019]	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Dit. Bandar Udara	20,00	0,00
430	Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat (Major Project : MP02) [E0112]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	Dit. Bandar Udara	30,00	0,00
H	Pengembangan Bandar Udara				
431	Pengembangan Bandara Malikus Saleh [E0022]	Kab. Aceh Utara, Aceh	Bandara Rembele	80,00	0,00
432	Pengembangan Bandara Kualanamu (Major Project : MP02) [E0025]	Kab. Deliserdang, Sumut	Dit. Bandar Udara	0,00	200,00
433	Pengembangan Bandara Silangit (Major Project : MP02) [E0026]	Kab. Tapanuli Utara, Sumut	Dit. Bandar Udara	0,00	100,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
434	Pengembangan Bandara Sibisa (Major Project : MP02) [E0024]	Kab. Toba Samosir, Sumut	Bandara Dr F.L. Tobing	124,23	0,00
435	Pengembangan KI Bintang Aerospace (Major Project : MP08) [E0032]	Kab. Bintang, Kepri	Dit. Bandar Udara	0,00	5.374,00
436	Pengembangan Bandara Muko Muko [E0034]	Kab. Muko-Muko, Bengkulu	Bandara Muko-Muko	80,80	0,00
437	Pengembangan Bandara Sultan Thaha [E0035]	Kota Jambi, Jambi	Dit. Bandar Udara	0,00	100,00
438	Pengembangan Bandara H.A.S Hanandjoedin - Tanjung Pandan (Major Project : MP02) [E0036]	Kab. Belitung, Babel	Bandara A.S Hanandjoeddin	0,00	120,00
439	Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta [E0037]	Kota Tangerang, Banten	Dit. Bandar Udara	0,00	6.500,00
440	Pengembangan Bandara Dewadaru - Karimun Jawa (Major Project : MP02) [E0040]	Kab. Rembang, Jateng	Bandara Dewadaru	13,20	0,00
441	Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga (Major Project : MP02) [E0039]	Kab. Purbalingga, Jateng	Dit. Bandar Udara	0,00	500,00
442	Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo (Major Project : MP02) [E0038]	Kab. Boyolali, Jateng	Dit. Bandar Udara	0,00	0,00
443	Pengembangan Bandara Kulon Progo (Major Project : MP02) [E0041]	Kab. Kulonprogo, DIY	Dit. Bandar Udara	0,00	200,00
444	Pengembangan Bandara Juanda [E0043]	Kab. Sidoarjo, Jatim	Dit. Bandar Udara	0,00	250,00
445	Pengembangan Bandara Ngurah Rai (Major Project : MP02, MP09) [E0044]	Kota Denpasar, Bali	Dit. Bandar Udara	0,00	900,00
446	Pengembangan Bandara Lombok (Major Project : MP02) [E0046]	Kab. Lombok Tengah, NTB	Dit. Bandar Udara	0,00	350,00
447	Pengembangan Bandara M. Salahuddin-Bima [E0045]	Kab. Bima, NTB	Bandara Muhamad Salahudin	124,62	0,00
448	Pengembangan Bandara Haliwen - Atambua [E0049]	Kab. Belu, NTT	Bandara Haliwen	6,38	0,00
449	Pengembangan Bandara Mali - Alor [E0047]	Kab. Alor, NTT	Bandara Mali	41,24	0,00
450	Pengembangan Bandara Soa - Bajawa [E0050]	Kab. Ngada, NTT	Bandara Soa	43,50	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
451	Pengembangan Bandara Komodo - Labuan Bajo [E0048]	Kab. Manggarai Barat, NTT	Bandara Komodo	1.200,00	0,00
452	Pengembangan Bandara Pangsuma - Putussibau [E0052]	Kab. Kapuas Hulu, Kalbar	Kantor UPBU Pangsuma Putussibau	1,50	0,00
453	Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin) (Major Project : MP03) [E0053]	Kab. Tanah Bumbu, Kalsel	Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru	45,00	0,00
454	Pengembangan Bandara Kalimantan [E0054]	Kab. Berau, Kaltim	Bandara Kalimantan	28,40	0,00
455	Pengembangan Bandara Tanjung Bara [E0057]	Kab. Kutai Timur, Kaltim	Dit. Bandar Udara	80,00	0,00
456	Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman [E0056]	Kota Balikpapan, Kaltim	Dit. Bandar Udara	0,00	200,00
457	Pengembangan Bandara Tanjung Harapan (Major Project : MP03, MP11) [E0059]	Kab. Bulungan, Kaltara	Bandara Tanjung Harapan	115,00	0,00
458	Pengembangan Bandara Internasional Juwata [E0061]	Kota Tarakan, Kaltara	Dit. Bandar Udara	0,00	150,00
459	Pengembangan Bandara Hasanuddin [E0063]	Kab. Maros, Sulsel	Dit. Bandar Udara	0,00	250,00
460	Pengembangan Bandara Tampa Padang [E0064]	Kab. Mamuju, Sulbar	Bandara Tampa Padang	77,62	0,00
461	Pengembangan Bandara Mutiara (Major Project : MP03) [E0065]	Kota Palu, Sulteng	Bandara Mutiara	245,00	0,00
462	Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi) (Major Project : MP02) [E0066]	Kab. Wakatobi, Sultra	Kantor UPBU Matahora	288,24	0,00
463	Pengembangan Bandara Bandanaira [E0067]	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Bandara Bandanaira	99,00	0,00
464	Pengembangan Bandara Dumatubun - Langgur [E0075]	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	Bandara Dumatubun	50,00	0,00
465	Pengembangan Bandara Saumlaki [E0074]	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	Bandara Saumlaki	6,20	0,00
466	Pengembangan Bandara Dobo [E0071]	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	Bandara Dobo	25,00	0,00
467	Pengembangan Bandara Kuffar [E0069]	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	Kantor UPBU John Becker	80,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
468	Pengembangan Bandara Moa [E0070]	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	Kantor UPBU John Becker	64,88	0,00
469	Pengembangan Bandara Namrole [E0068]	Kab. Buru Selatan, Maluku	Kantor UPBU Namrole	30,00	0,00
470	Pengembangan Bandara Patimura [E0072]	Kota Ambon, Maluku	Dit. Bandar Udara	0,00	200,00
471	Pengembangan Bandara Oesman Sadik - Labuha [E0076]	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Bandara Oesman Sadik	27,00	0,00
472	Pengembangan Bandara Sanana [E0078]	Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara	Kantor UPBU Emalamo	80,00	0,00
473	Pengembangan Bandara Buli Maba [E0077]	Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara	Bandara Buli	90,00	0,00
474	Pengembangan Bandara Pitu-Morotai (Major Project : MP02) [E0079]	Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara	Kantor UPBU Pitu	47,00	0,00
475	Pengembangan Bandara Anggi (Major Project : MP12) [E0111]	Kab. Manokwari, Papua Barat	Bandara Rendani	250,00	0,00
476	Pengembangan Bandara Rendani (Major Project : MP03, MP12) [E0117]	Kab. Manokwari, Papua Barat	Bandara Rendani	250,00	0,00
477	Pengembangan Bandara Marinda (Waisai) (Major Project : MP02, MP12) [E0120]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	Kantor UPBU Marinda	5,61	0,00
478	Pengembangan Bandara Marinda (Waisai) [E0761]	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	Kantor UPBU Marinda	4,84	0,00
479	Pengembangan Bandara Bintuni [E0119]	Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat	Bandara Bintuni	45,00	0,00
480	Pengembangan Bandara Babo (Major Project : MP03) [E0121]	Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat	Bandara Babo	38,12	0,00
481	Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (Major Project : MP11, MP12) [E0118]	Kota Sorong, Papua Barat	Bandara Domine Eduard Osok	180,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
482	Pengembangan Bandara Sentani [E0133]	Kab. Jayapura, Papua	Dit. Bandar Udara	0,00	400,00
483	Pengembangan Bandara Mopah [E0122]	Kab. Merauke, Papua	Bandara Mopah	48,10	0,00
484	Pengembangan Bandara Keping [E0135]	Kab. Mappi, Papua	Bandara Keping	20,00	0,00
485	Pengembangan Bandara Tiom (Major Project : MP12) [E0129]	Kab. Lanny Jaya, Papua	Bandara Tiom	80,00	0,00
I	Pengembangan Bandar Udara di Daerah Terisolir, Perbatasan dan Rawan Bencana				
486	Pengembangan Bandara Lasikin [E0021]	Kab. Simeuleu, Aceh	Bandara Lasikin	85,00	0,00
487	Pengembangan Bandara Lasikin [E2684]	Kab. Simeuleu, Aceh	Bandara Lasikin	137,24	0,00
488	Pengembangan Bandara Maimun Saleh [E0023]	Kota Sabang, Aceh	Bandara Maimun Saleh Sabang	60,00	0,00
489	Pengembangan Bandara Maimun Saleh [E2701]	Kota Sabang, Aceh	Bandara Maimun Saleh Sabang	62,11	0,00
490	Pengembangan Bandara Rokot [E0027]	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	Bandara Rokot Sipora	465,00	0,00
491	Pengembangan Bandara Tambelan [E0029]	Kab. Bintan, Kepri	Bandara Dabo	62,02	0,00
492	Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah [E0031]	Kab. Karimun, Kepri	Bandara Sei Bati	85,00	0,00
493	Pengembangan Bandara Natuna [E0030]	Kab. Natuna, Kepri	Kantor UPBU Ranai	49,00	0,00
494	Pengembangan Bandara Letung [E0028]	Kab. Anambas, Kepri	Bandara Dabo	50,00	0,00
495	Pengembangan Bandara Enggano [E0033]	Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu	Bandara Fatmawati	75,00	0,00
496	Pengembangan Bandara Harun Thohir [E0042]	Kab. Gresik, Jatim	Bandara Bawean	65,00	0,00
497	Pengembangan Bandara Pangsuma [E0051]	Kab. Kapuas Hulu, Kalbar	Kantor UPBU Pangsuma Putussibau	61,50	0,00
498	Pengembangan Bandara Maratua [E0055]	Kab. Berau, Kaltim	Bandara Kalimantan	75,00	0,00
499	Pengembangan Bandara Data Dawai [E0058]	Kab. Kutai Barat, Kaltim	Bandara Data Dawai	54,10	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
500	Pengembangan Bandara Yuwai Semaring [E0062]	Kab. Nunukan, Kaltara	Bandara Yuwai Semaring	45,00	0,00
501	Pengembangan Bandara Long Apung [E0060]	Kab. Malinau, Kaltara	Bandara Long Apung	48,37	0,00
502	Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri [E0073]	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	Bandara Saumlaki	68,00	0,00
J	Pengembangan Jembatan Udara				
503	Pengembangan Bandara Wamena (Major Project : MP29) [E0123]	Kab. Jayawijaya, Papua	Bandara Wamena	1.367,22	0,00
504	Pengembangan Bandara Mulia (Major Project : MP29) [E0128]	Kab. Puncak Jaya, Papua	Kantor UPBU Mulia	120,54	0,00
505	Pengembangan Bandara Mozes Kilangin (Major Project : MP29) [E0134]	Kab. Mimika, Papua	Bandara Mozes Kilangin	748,54	0,00
506	Pengembangan Bandara Koroway Batu (Major Project : MP29) [E0124]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	641,38	0,00
507	Pengembangan Bandara Magellum (Major Project : MP29) [E0125]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	31,07	0,00
508	Pengembangan Bandara Tanah Merah (Major Project : MP29) [E0126]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Tanah Merah	1.179,60	0,00
509	Pengembangan Bandara Oksibil (Major Project : MP29) [E0127]	Kab. Pegunungan Bintang, Papua	Bandara Oksibil	290,25	0,00
510	Pengembangan Bandara Korupun (Major Project : MP29) [E0131]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	50,00	0,00
511	Pengembangan Bandara Nop Goliath (Major Project : MP29) [E0132]	Kab. Yahukimo, Papua	Kantor UPBU Nop Goliat Dekai	525,84	0,00
512	Pengembangan Bandara Elelim (Major Project : MP29) [E0130]	Yalimo, Papua	Kantor UPBU Elelim	397,50	0,00
513	Pengembangan Bandara Ilaga (Major Project : MP29) [E0136]	Kab. Puncak, Papua	Kantor UPBU Illaga	470,52	0,00
K	Rehabilitasi Bandar Udara di Daerah Terisolir, Perbatasan dan Rawan Bencana				
514	Rehabilitasi Bandara Lasondre [E0081]	Kab. Nias Selatan, Sumut	Bandara Lasondre	55,00	0,00
515	Rehabilitasi Bandara Binaka [E0080]	Kota Gunung Sitoli, Sumut	Bandara Binaka	90,00	0,00
516	Rehabilitasi Bandara D.C. Saundale [E0083]	Kab. Rote Ndao, NTT	Bandara Dc Saudale	64,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
517	Rehabilitasi Bandara Tardamu - Sabu [E0082]	Kab. Sabu Raijua, NTT	Bandara Tardamu	65,00	0,00
518	Rehabilitasi Bandara Seko [E0084]	Kab. Luwu Utara, Sulsel	Bandara Seko	50,00	0,00
519	Rehabilitasi Bandara Rampi [E0085]	Kab. Luwu Utara, Sulsel	Bandara Rampi	80,00	0,00
520	Rehabilitasi Bandara Naha [E0086]	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	Bandara Naha	60,00	0,00
521	Rehabilitasi Bandara Melonguane [E0087]	Kab. Kepulauan Talaud, Sulut	Bandara Melonguane	40,00	0,00
522	Rehabilitasi Bandara Miangas [E0088]	Kab. Kepulauan Talaud, Sulut	Bandara Melonguane	45,00	0,00
523	Rehabilitasi Bandara Gebe [E0089]	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Bandara Babullah	35,00	0,00
524	Rehabilitasi Bandara Inanwatan [E0137]	Kab. Sorong Selatan, Papua Barat	Bandara Inanwatan	72,00	0,00
525	Rehabilitasi Bandara Enarotali [E0139]	Kab. Paniai, Papua	Kantor UPBU Enarotali	85,96	0,00
526	Rehabilitasi Bandara Mindiptana [E0138]	Kab. Boven Digoel, Papua	Bandara Mindiptana	35,00	0,00
L	Pengadaan Pesawat Kalibrasi				
527	Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi [E0090]	Kab. Tangerang, Banten	BLU Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	1.110,00	0,00
M	Peralatan Penunjang Pengendalian dan Pengawasan Navigasi Penerbangan				
528	Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNS/ATM [E0091]	DKI Jakarta	Dit. Navigasi Penerbangan	335,33	0,00
V	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ)				
A	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek				
529	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Banten (Major Project : MP23) [I0038]	Kab. Tangerang, Banten	BPTJ	25,00	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
530	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0003]	DKI Jakarta	BPTJ	25,00	0,00
531	Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut/CBL (Prioritas Nasional) (Major Project : MP23) [I0004]	Kab. Bekasi, Jabar	BPTJ	70,00	1.500,00
532	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Jawa Barat (Major Project : MP23) [I0037]	Kab. Bekasi, Jabar	BPTJ	25,00	0,00
B	Pengembangan dan Peningkatan Integrasi Simpul Transportasi dan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di Wilayah Jabodetabek				
533	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development (TOD) Banten [I0046]	Kota Tangerang, Banten	BPTJ	100,00	0,00
534	Pembangunan Fasilitas Integrasi Banten (Major Project : MP23) [I0048]	Kota Tangerang, Banten	BPTJ	13,40	0,00
535	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development (TOD) DKI Jakarta [I0010]	DKI Jakarta	BPTJ	100,00	8.000,00
536	Pembangunan Fasilitas Integrasi DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0011]	DKI Jakarta	BPTJ	28,00	0,00
537	Pembangunan Fasilitas Integrasi Jawa Barat (Major Project : MP23) [I0047]	Kab. Bogor, Jabar	BPTJ	28,60	0,00
538	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development (TOD) Jawa Barat [I0045]	Kota Bogor, Jabar	BPTJ	200,00	0,00
C	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek				
539	Elevated Loopline Banten (Major Project : MP23) [I0050]	Kab. Tangerang, Banten	BPTJ	0,00	600,00
540	Elevated Loopline DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0032]	DKI Jakarta	BPTJ	0,00	24.860,00
541	Elevated Loopline Bekasi (Major Project : MP23) [I0049]	Kab. Bekasi, Jabar	BPTJ	0,00	2.000,00
D	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan				
542	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Banten (Major Project : MP23) [I0042]	Kota Tangerang, Banten	BPTJ	105,00	0,00



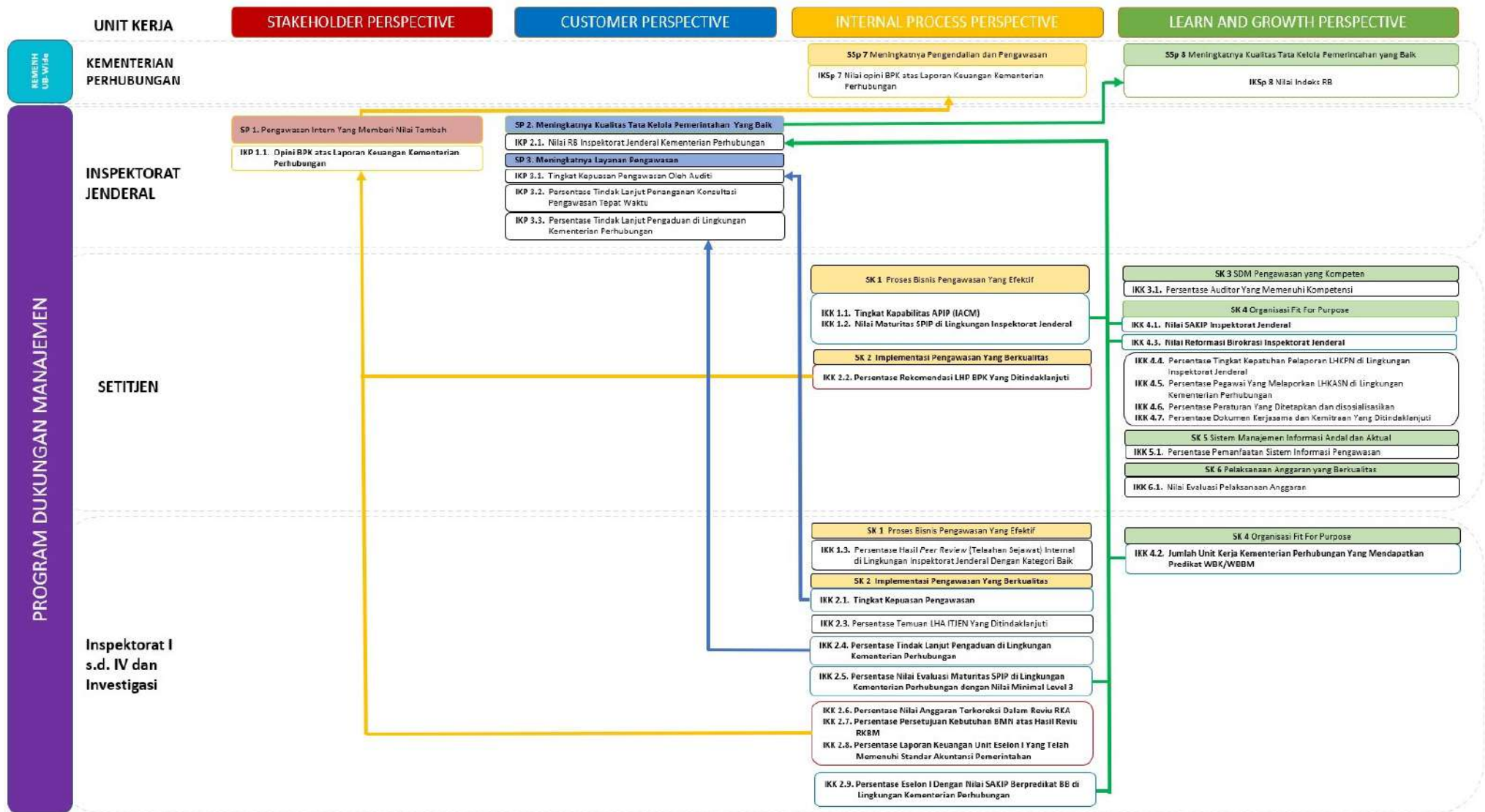
NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
543	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0006]	DKI Jakarta	BPTJ	70,00	4.050,00
544	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jawa Barat (Major Project : MP23) [I0041]	Kota Bogor, Jabar	BPTJ	175,00	0,00
E	Pemenuhan dan Peningkatan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek				
545	Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Banten (Major Project : MP23) [I0044]	Kota Tangerang, Banten	BPTJ	52,50	0,00
546	Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0007]	DKI Jakarta	BPTJ	31,50	0,00
547	Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jawa Barat (Major Project : MP23) [I0043]	Kota Bogor, Jabar	BPTJ	126,00	0,00
F	Pengembangan Terminal Tipe A di Jabodetabek				
548	Pengembangan Terminal Type A Pondok Cabe (Major Project : MP23) [I0008]	Kota Tangerang Selatan, Banten	BPTJ	48,10	0,00
549	Pembangunan Terminal Type A Jatijajar (Major Project : MP23) [I0009]	Kota Depok, Jabar	BPTJ	14,10	0,00
G	Pengembangan Teknologi, Sistem Informasi Serta Pengelolaan Data dan Informasi Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek				
550	Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) Banten (Major Project : MP23) [I0036]	Kota Tangerang, Banten	BPTJ	18,00	0,00
551	Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) DKI Jakarta (Major Project : MP23) [I0002]	DKI Jakarta	BPTJ	60,00	0,00
552	Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) Jawa Barat (Major Project : MP23) [I0035]	Kota Bogor, Jabar	BPTJ	42,00	0,00
553	Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu Banten [I0040]	Kota Tangerang Selatan, Banten	BPTJ	72,81	0,00



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	WILAYAH	SATKER	Total APBN (Dalam Milyar)	NON-APBN (Dalam Milyar)
554	Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu DKI Jakarta [I0005]	DKI Jakarta	BPTJ	31,20	0,00
555	Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu Jawa Barat [I0039]	Kota Bogor, Jabar	BPTJ	151,39	0,00
VI	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
A	Perencanaan Infrastruktur Transportasi IKN				
556	Kajian Sistem Transportasi Cerdas di Ibukota Negara (Major Project : MP10) [G0001]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Puslitbang Transportasi Antarmoda	7,49	0,00
557	Kajian Sistem Transportasi Jalan dan Perkeretaapian IKN (Major Project : MP10) [G0002]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Puslitbang Transportasi Jalan dan KA	4,80	0,00
558	Kajian Sistem Transportasi Jalan dan Perkeretaapian IKN [G0085]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Puslitbang Transportasi Jalan dan KA	1,30	0,00
559	Kajian Pengembangan Transportasi Udara di Wilayah IKN (Major Project : MP10) [G0004]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Puslitbang Transportasi Udara	6,22	0,00
560	Kajian Pengembangan Transportasi Udara di Wilayah IKN [G0097]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, danau, dan Penyeberangan	5,00	0,00
561	Kajian Perencanaan Sistem Transportasi di IKN (Major Project : MP10) [G0005]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Sekretariat Balitbanghub	15,35	0,00
562	Kajian Perencanaan Sistem Transportasi di IKN [G0115]	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Sekretariat Balitbanghub	2,22	0,00



Lampiran 2. Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024





Lampiran 3. Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)					TOTAL APBN	
								2020	2021	2022	2023	2024		RM
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							124,29	122,81	145,40	167,07	191,52	751,08	751,08
WA	Program Dukungan Manajemen							124,29	122,81	145,40	167,07	191,52	751,08	751,08
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							124,61	123,30	146,85	169,11	194,14	758,00	758,00
02	Inspektorat Jenderal							124,61	123,30	146,85	169,11	194,14	758,00	758,00
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							124,29	122,81	145,40	167,07	191,52	751,08	751,08
SSp 07	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian							12,42	11,10	14,22	16,71	19,07	73,53	73,53
07	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	%	100	100	100	100	100	12,42	11,10	14,22	16,71	19,07	73,53	73,53
SSp 08	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							111,87	111,70	131,18	150,36	172,45	677,55	677,55
08	Indeks RB Kementerian Perhubungan	nilai	78	79	80	80	81	111,87	111,70	131,18	150,36	172,45	677,55	677,55
WA	Program Dukungan Manajemen							124,29	122,81	145,40	167,07	191,52	751,08	751,08
02	Inspektorat Jenderal							124,29	122,81	145,40	167,07	191,52	751,08	751,08
WA.01	Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern Yang Memberikan Nilai Tambah							9,50	9,85	11,67	13,35	14,86	59,23	59,23
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal							9,17	8,62	9,84	11,21	12,30	51,13	51,13
SK	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas							9,17	8,62	9,84	11,21	12,30	51,13	51,13
IKK	Persentase Laporan Keuangan Unit Kerja yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	%	27	36	45	55	63	4,66	4,51	4,81	5,19	5,49	24,66	24,66



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Output	Layanan Pengawasan Internal							4,66	4,51	4,81	5,19	5,49	24,66	24,66
Sub Out	Reviu							4,66	4,51	4,81	5,19	5,49	24,66	24,66
<i>IK</i>	<i>Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kemenhub dan Unit Kerja Eselon I</i>	<i>Laporan</i>	30	39	35	35	35	4,66	4,51	4,81	5,19	5,49	24,66	24,66
IKK	Persentase persetujuan BMN atas hasil Reviu RKBMN	%	70	72	74	76	78	1,86	1,55	2,21	2,92	3,40	11,95	11,95
Output	Layanan Pengawasan Internal							1,86	1,55	2,21	2,92	3,40	11,95	11,95
Sub Out	Reviu							1,86	1,55	2,21	2,92	3,40	11,95	11,95
<i>IK</i>	<i>Layanan Reviu RKBMN</i>	<i>Layanan</i>	10	10	10	10	10	1,86	1,55	2,21	2,92	3,40	11,95	11,95
IKK	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA	%	29	28	26	27	25	2,64	2,56	2,81	3,10	3,41	14,52	14,52
Output	Layanan Pengawasan Internal							2,64	2,56	2,81	3,10	3,41	14,52	14,52
Sub Out	Reviu							2,64	2,56	2,81	3,10	3,41	14,52	14,52
<i>IK</i>	<i>Layanan Reviu RKA</i>	<i>Layanan</i>	10	13	15	15	15	2,64	2,56	2,81	3,10	3,41	14,52	14,52
4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan							0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
SK	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas							0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
IKK	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	80	82	85	87	90	0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
Output	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
Sub Out	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan							0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
<i>IK</i>	<i>Jumlah Laporan Tindak Lanjut LHP BPK</i>	<i>Laporan</i>	2	2	2	2	2	0,33	1,23	1,83	2,14	2,56	8,10	8,10
WA.02	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal							2,92	1,25	2,55	3,36	4,22	14,30	14,30
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal							0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33
SK	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas							0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33
IKK	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	63	65	67	69	71	0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33
Output	Layanan Pengawasan Internal							0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33
Sub Out	Survey Pengawasan							0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Survey Kepuasan Pengawasan</i>	<i>Layanan</i>	1	1	1	1	1	0,32	0,72	1,51	2,11	2,66	7,33	7,33



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal							2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
SK	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas							2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
IKK	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	90	92	95	98	100	2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
Output	Layanan Pengawasan Internal							2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
Sub Out	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat							2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
IK	Jumlah laporan kegiatan tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Layanan	2	2	2	2	2	2,59	0,53	1,04	1,25	1,56	6,98	6,98
WA.03	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							111,87	111,70	131,18	150,36	172,45	677,55	677,55
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal							43,49	41,01	51,25	61,91	74,42	272,07	272,07
SK	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif							0,28	0,17	0,25	0,40	0,50	1,60	1,60
IKK	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal	%	70	75	80	85	90	0,28	0,17	0,25	0,40	0,50	1,60	1,60
Output	Layanan Pengawasan Internal							0,28	0,17	0,25	0,40	0,50	1,60	1,60
Sub Out	Telaahan Sejawat Internal							0,28	0,17	0,25	0,40	0,50	1,60	1,60
IK	Jumlah Layanan Telaahan Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	Layanan	1	1	1	1	1	0,28	0,17	0,25	0,40	0,50	1,60	1,60
SK	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas							26,09	36,52	42,80	49,93	56,78	212,13	212,13
IKK	Persentase Rekomendasi LHA Itjen Yang Ditindaklanjuti	%	82	85	86	87	90	25,31	34,37	39,08	45,10	50,47	194,33	194,33
Output	Layanan Pengawasan Internal							25,31	34,37	39,08	45,10	50,47	194,33	194,33
Sub Out	Audit Kinerja							16,69	23,56	26,34	30,94	33,13	130,65	130,65
IK	Layanan Audit Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	16,69	23,56	26,34	30,94	33,13	130,65	130,65
Sub Out	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)							6,03	5,07	5,43	6,00	6,51	29,04	29,04
IK	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Layanan	1	1	1	1	1	6,03	5,07	5,43	6,00	6,51	29,04	29,04
Sub Out	Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi							1,66	4,23	4,57	5,16	5,54	21,17	21,17
IK	Layanan Pemantauan, Supervisi dan Pengawasan	Layanan	1	1	1	1	1	1,66	4,23	4,57	5,16	5,54	21,17	21,17



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Sub Out	Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)							0,93	1,51	2,74	3,00	5,29	13,47	13,47
IK	Layanan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit (LHA) Itjen	Layanan	1	1	1	1	1	0,93	1,51	2,74	3,00	5,29	13,47	13,47
IKK	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	75	80	85	95	100	0,36	1,20	1,22	1,25	1,27	5,31	5,31
Output	Layanan Pengawasan Internal							0,36	1,20	1,22	1,25	1,27	5,31	5,31
Sub Out	Evaluasi							0,36	1,20	1,22	1,25	1,27	5,31	5,31
IK	Layanan Evaluasi Maturitas SPIP	Layanan	1	1	1	1	1	0,36	1,20	1,22	1,25	1,27	5,31	5,31
IKK	Persentase Eselon I dengan nilai/predikat SAKIP berpredikat BB	%	76	78	79	81	82	0,42	0,95	2,50	3,59	5,04	12,49	12,49
Output	Layanan Pengawasan Internal							0,42	0,95	2,50	3,59	5,04	12,49	12,49
Sub Out	Evaluasi							0,42	0,95	2,50	3,59	5,04	12,49	12,49
IK	Layanan Evaluasi SAKIP Eselon I di lingkungan Kemenhub	Layanan	9	9	9	9	9	0,42	0,95	2,50	3,59	5,04	12,49	12,49
SK	Organisasi Fit For Purpose							17,12	4,33	8,20	11,57	17,14	58,35	58,35
IKK	Jumlah Unit Kerja Kementerian Perhubungan Yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3	5	6	7	8	0,57	0,54	1,65	2,65	4,02	9,44	9,44
Output	Layanan Pengawasan Internal							0,57	0,54	1,65	2,65	4,02	9,44	9,44
Sub Out	Pengelolaan Penilaian Zona Integritas							0,57	0,54	1,65	2,65	4,02	9,44	9,44
IK	Jumlah Layanan Penilaian / Evaluasi Zona Integritas	Layanan	1	1	1	1	1	0,57	0,54	1,65	2,65	4,02	9,44	9,44
IKK	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	81	82	84	86	87	14,56	2,04	3,14	4,25	5,86	29,86	29,86
Output	Layanan Pengawasan Internal							14,56	2,04	3,14	4,25	5,86	29,86	29,86
Sub Out	Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja							14,56	2,04	3,14	4,25	5,86	29,86	29,86
IK	Layanan Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja Pengawasan	Layanan	1	1	1	1	1	14,56	2,04	3,14	4,25	5,86	29,86	29,86
IKK	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai	77	78	79	80	81	1,99	1,74	3,40	4,67	7,25	19,05	19,05
Output	Layanan Pengawasan Internal							1,99	1,74	3,40	4,67	7,25	19,05	19,05
Sub Out	Pembinaan Unit Kepatuhan Internal (UKI)							0,09	0,27	0,78	0,89	1,29	3,33	3,33



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
IK	Jumlah Layanan Pembinaan UKI	Layanan	1	1	1	1	1	0,09	0,27	0,78	0,89	1,29	3,33	3,33
Sub Out	Pencegahan KKN (Stranas PK, UPG)							1,90	1,47	2,62	3,78	5,96	15,72	15,72
IK	Jumlah Layanan Pencegahan KKN	Layanan	1	1	1	1	1	1,90	1,47	2,62	3,78	5,96	15,72	15,72
4663	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan							4,52	6,49	7,72	10,06	12,45	41,24	41,24
SK	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif							0,14	0,18	0,75	0,99	1,29	3,35	3,35
IKK	Tingkat Kapabilitas APIP	Indeks	3	3	3	3	4	0,14	0,18	0,75	0,99	1,29	3,35	3,35
Output	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							0,14	0,18	0,75	0,99	1,29	3,35	3,35
Sub Out	Tata Kelola Kapabilitas APIP							0,14	0,18	0,75	0,99	1,29	3,35	3,35
IK	Jumlah Layanan Tata Kelola Kapabilitas APIP	Layanan	1	1	1	1	1	0,14	0,18	0,75	0,99	1,29	3,35	3,35
SK	Organisasi Fit For Purpose							2,04	3,30	3,46	4,97	6,35	20,13	20,13
IKK	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai	77	78	79	80	81	1,56	2,42	1,91	2,39	2,93	11,21	11,21
Output	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							1,56	2,42	1,91	2,39	2,93	11,21	11,21
Sub Out	Ketatausahaan							0,69	0,50	0,52	0,53	0,54	2,78	2,78
IK	Jumlah Layanan Ketatausahaan	Layanan	1	1	1	1	1	0,69	0,50	0,52	0,53	0,54	2,78	2,78
Sub Out	Tata Laksana Organisasi dan Kelembagaan							0,25	0,27	0,34	0,36	0,41	1,62	1,62
IK	Jumlah Layanan Ketatalaksanaan Organisasi dan Kelembagaan	Layanan	1	1	1	1	1	0,25	0,27	0,34	0,36	0,41	1,62	1,62
Sub Out	Reformasi Birokrasi							0,54	0,40	0,80	1,25	1,72	4,72	4,72
IK	Jumlah Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Layanan	1	1	1	1	1	0,54	0,40	0,80	1,25	1,72	4,72	4,72
Sub Out	Pengelolaan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Inspektorat Jenderal							0,09	1,25	0,25	0,25	0,26	2,09	2,09
IK	Jumlah Layanan Pengelolaan UKI	Layanan	1	1	1	1	1	0,09	1,25	0,25	0,25	0,26	2,09	2,09
IKK	Persentase Pegawai Yang Melaporkan LHKASN di Kementerian Perhubungan	%	90	95	95	100	100	0,43	0,80	1,47	2,48	3,33	8,51	8,51
Output	Layanan SDM							0,43	0,80	1,47	2,48	3,33	8,51	8,51
Sub Out	Penerimaan Pegawai							0,11	0,12	0,52	1,13	1,63	3,51	3,51
IK	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal	Orang	262	290	339	373	403	0,11	0,12	0,52	1,13	1,63	3,51	3,51



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Sub Out	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional							0,09	0,17	0,41	0,79	1,10	2,56	2,56
IK	<i>Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal</i>	<i>Orang</i>	262	290	339	373	403	0,09	0,17	0,41	0,79	1,10	2,56	2,56
Sub Out	Evaluasi dan Pengembangan Pegawai							0,14	0,26	0,27	0,29	0,30	1,26	1,26
IK	<i>Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal</i>	<i>Orang</i>	262	290	339	373	403	0,14	0,26	0,27	0,29	0,30	1,26	1,26
Sub Out	Administrasi Kepegawaian							0,06	0,20	0,21	0,22	0,24	0,94	0,94
IK	<i>Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal</i>	<i>Orang</i>	262	290	339	373	403	0,06	0,20	0,21	0,22	0,24	0,94	0,94
Sub Out	Penempatan, Mutasi dan Disiplin Pegawai							0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,24	0,24
IK	<i>Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal</i>	<i>Orang</i>	262	290	339	373	403	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,24	0,24
IKK	Persentase Pegawai Yang Melaporkan LHKPN di Inspektorat Jenderal Kemenhub	%	100	100	100	100	100	0,05	0,08	0,09	0,09	0,10	0,41	0,41
Output	Layanan SDM							0,05	0,08	0,09	0,09	0,10	0,41	0,41
Sub Out	Pelaporan LHKPN dan LHKASN							0,05	0,08	0,09	0,09	0,10	0,41	0,41
IK	<i>Jumlah Layanan Pelaporan LHKPN dan LHKASN</i>	<i>Orang</i>	262	290	339	373	403	0,05	0,08	0,09	0,09	0,10	0,41	0,41
SK	SDM Pengawasan Yang Kompeten							2,35	3,00	3,51	4,11	4,80	17,77	17,77
IKK	Persentase Auditor Yang Memenuhi Kompetensi	%	60	70	75	80	85	2,35	3,00	3,51	4,11	4,80	17,77	17,77
Output	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal							2,35	3,00	3,51	4,11	4,80	17,77	17,77
Sub Out	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Itjen							2,35	3,00	3,51	4,11	4,80	17,77	17,77
IK	<i>Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal</i>	<i>Orang</i>	150	320	330	340	350	2,35	3,00	3,51	4,11	4,80	17,77	17,77
4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan							56,05	56,50	59,76	61,22	63,22	296,75	296,75
SK	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif							0,13	0,37	0,50	0,65	0,86	2,52	2,52
IKK	Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Indeks	3	3	3	3	4	0,13	0,27	0,32	0,39	0,46	1,57	1,57
Output	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							0,13	0,27	0,32	0,39	0,46	1,57	1,57
Sub Out	Penyelenggaraan SPIP							0,13	0,27	0,32	0,39	0,46	1,57	1,57
IK	<i>Jumlah Layanan Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal</i>	<i>Layanan</i>	1	1	1	1	1	0,13	0,27	0,32	0,39	0,46	1,57	1,57
IKK	Tingkat Kapabilitas APIP	Indeks	3	3	3	3	4	0,00	0,10	0,18	0,27	0,40	0,95	0,95



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Output	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							0,00	0,10	0,18	0,27	0,40	0,95	0,95
Sub Out	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)							0,00	0,10	0,18	0,27	0,40	0,95	0,95
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Program Kerja Pengawasan Tahunan</i>	<i>Layanan</i>	1	1	1	1	1	0,00	0,10	0,18	0,27	0,40	0,95	0,95
SK	Organisasi Fit For Purpose							8,82	6,10	8,01	8,72	10,08	41,74	41,74
IKK	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	81	82	84	86	87	4,93	3,63	4,44	5,08	6,37	24,45	24,45
Output	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							0,74	0,56	0,75	1,02	1,50	4,56	4,56
Sub Out	Perencanaan Penganggaran Inspektorat Jenderal							0,52	0,41	0,53	0,69	0,89	3,03	3,03
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</i>	<i>Layanan</i>	2	2	2	2	2	0,52	0,41	0,53	0,69	0,89	3,03	3,03
Sub Out	Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal							0,22	0,15	0,22	0,33	0,60	1,53	1,53
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal</i>	<i>Layanan</i>	2	2	2	2	2	0,22	0,15	0,22	0,33	0,60	1,53	1,53
Output	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							4,19	3,08	3,69	4,06	4,87	19,89	19,89
Sub Out	Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal							4,19	3,08	3,69	4,06	4,87	19,89	19,89
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal</i>	<i>Layanan</i>	2	2	2	2	2	4,19	3,08	3,69	4,06	4,87	19,89	19,89
IKK	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai	77	78	79	80	81	3,89	2,47	3,57	3,64	3,71	17,29	17,29
Output	Layanan Sarana Internal							3,89	2,47	3,57	3,64	3,71	17,29	17,29
Sub Out	Peralatan Fasilitas Perkantoran							3,89	2,47	3,57	3,64	3,71	17,29	17,29
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Sarana Internal</i>	<i>Unit</i>	100	176	80	90	100	3,89	2,47	3,57	3,64	3,71	17,29	17,29
SK	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas							47,11	50,03	51,24	51,84	52,27	252,49	252,49
IKK	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	92	93	95	96	47,11	50,03	51,24	51,84	52,27	252,49	252,49
Output	Layanan Perkantoran							44,98	46,81	48,44	49,30	49,85	239,38	239,38
Sub Out	Gaji dan Tunjangan							39,62	41,49	42,32	42,74	43,17	209,35	209,35
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Operasional Perkantoran</i>	<i>Layanan</i>	2	2	2	2	2	39,62	41,49	42,32	42,74	43,17	209,35	209,35
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran							5,36	5,32	6,12	6,55	6,67	30,02	30,02
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Operasional Perkantoran</i>	<i>Layanan</i>	2	2	2	2	2	5,36	5,32	6,12	6,55	6,67	30,02	30,02



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Output	Layanan Umum							2,12	3,22	2,80	2,55	2,42	13,11	13,11
Sub Out	Pengelolaan Perlengkapan dan Umum							0,69	2,11	1,58	1,27	1,08	6,72	6,72
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Umum Inspektorat Jenderal</i>	<i>Layanan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,69</i>	<i>2,11</i>	<i>1,58</i>	<i>1,27</i>	<i>1,08</i>	<i>6,72</i>	<i>6,72</i>
Sub Out	Laporan Keuangan dan Penyerapan Anggaran							1,44	1,11	1,22	1,28	1,35	6,40	6,40
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Umum Inspektorat Jenderal</i>	<i>Layanan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1,44</i>	<i>1,11</i>	<i>1,22</i>	<i>1,28</i>	<i>1,35</i>	<i>6,40</i>	<i>6,40</i>
4665	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan							1,19	2,99	4,23	5,36	6,51	20,28	20,28
SK	Sistem Informasi Manajemen Yang Handal dan Aktual							1,19	2,99	4,23	5,36	6,51	20,28	20,28
IKK	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	%	75	80	85	90	95	1,19	2,99	4,23	5,36	6,51	20,28	20,28
Output	Layanan Data dan Informasi							1,19	2,99	4,23	5,36	6,51	20,28	20,28
Sub Out	Data dan Informasi Pengawasan							0,44	0,62	0,73	0,86	1,01	3,65	3,65
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan</i>	<i>Layanan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,44</i>	<i>0,62</i>	<i>0,73</i>	<i>0,86</i>	<i>1,01</i>	<i>3,65</i>	<i>3,65</i>
Sub Out	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengawasan							0,70	1,35	2,00	2,50	3,00	9,55	9,55
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan</i>	<i>Layanan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,70</i>	<i>1,35</i>	<i>2,00</i>	<i>2,50</i>	<i>3,00</i>	<i>9,55</i>	<i>9,55</i>
Sub Out	Peralatan Sistem Informasi Pengawasan							0,05	1,03	1,50	2,00	2,50	7,08	7,08
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan</i>	<i>Layanan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,05</i>	<i>1,03</i>	<i>1,50</i>	<i>2,00</i>	<i>2,50</i>	<i>7,08</i>	<i>7,08</i>
4669	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan							0,00	1,00	3,07	5,16	7,27	16,49	16,49
SK	Organisasi Fit For Purpose							0,00	1,00	3,07	5,16	7,27	16,49	16,49
IKK	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	0,00	1,00	3,07	5,16	7,27	16,49	16,49
Output	Kerjasama							0,00	0,50	1,54	2,59	3,65	8,28	8,28
Sub Out	Kerjasama Bidang Pengawasan							0,00	0,50	1,54	2,59	3,65	8,28	8,28
<i>IK</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Kerjasama Bidang Pengawasan</i>	<i>Kesepakatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,54</i>	<i>2,59</i>	<i>3,65</i>	<i>8,28</i>	<i>8,28</i>
Output	Kemitraan							0,00	0,50	1,53	2,57	3,62	8,21	8,21
Sub Out	Kemitraan Bidang Pengawasan							0,00	0,50	1,53	2,57	3,62	8,21	8,21



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
IK	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Bidang Pengawasan	Kesepakatan	1	1	1	1	1	0,00	0,50	1,53	2,57	3,62	8,21	8,21
4818	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan							3,32	1,61	2,39	2,77	3,86	13,95	13,95
SK	Organisasi Fit For Purpose							3,32	1,61	2,39	2,77	3,86	13,95	13,95
IKK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan	Layanan	1	1	1	1	1	3,32	1,61	2,39	2,77	3,86	13,95	13,95
Output	Layanan Kehumasan dan Protokoler							3,32	1,61	2,39	2,77	3,86	13,95	13,95
Sub Out	Protokoler Pimpinan							1,02	0,49	0,52	0,55	0,57	3,15	3,15
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	1,02	0,49	0,52	0,55	0,57	3,15	3,15
Sub Out	Hubungan Kemasyarakatan							0,34	0,16	0,17	0,18	0,19	1,04	1,04
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	0,34	0,16	0,17	0,18	0,19	1,04	1,04
Sub Out	Majalah, Buletin, Media Informasi dan Dokumentasi							1,59	0,77	0,81	0,85	0,89	4,91	4,91
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	1,59	0,77	0,81	0,85	0,89	4,91	4,91
Sub Out	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)							0,37	0,18	0,89	1,20	2,21	4,85	4,85
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	0,37	0,18	0,89	1,20	2,21	4,85	4,85
4820	Legislasi dan Ligitasi Pengawasan							3,29	2,10	2,77	3,88	4,72	16,77	16,77
SK	Organisasi Fit For Purpose							0,79	0,37	0,90	1,84	2,48	6,39	6,39
IKK	Persentase Peraturan Yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	0,79	0,37	0,90	1,84	2,48	6,39	6,39
Output	Peraturan Lainnya							0,79	0,37	0,90	1,84	2,48	6,39	6,39
Sub Out	Peraturan Bidang Pengawasan							0,79	0,37	0,90	1,84	2,48	6,39	6,39
IK	Jumlah Peraturan Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	Peraturan	2	5	6	8	8	0,79	0,37	0,90	1,84	2,48	6,39	6,39
SK	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif							2,50	1,73	1,87	2,04	2,24	10,38	10,38
IKK	Tingkat Kapabilitas APIP	Indeks	3	3	3	3	4	2,50	1,73	1,87	2,04	2,24	10,38	10,38
Output	Layanan Hukum							2,50	1,73	1,87	2,04	2,24	10,38	10,38



NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024						
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						TOTAL APBN
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	
Sub Out	Bantuan Hukum							0,00	0,23	0,25	0,27	0,30	1,05	1,05
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Hukum</i>	<i>Layanan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,23</i>	<i>0,25</i>	<i>0,27</i>	<i>0,30</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>
Sub Out	Komite Audit							2,50	1,50	1,62	1,77	1,94	9,33	9,33
<i>IK</i>	<i>Jumlah Layanan Hukum</i>	<i>Layanan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,62</i>	<i>1,77</i>	<i>1,94</i>	<i>9,33</i>	<i>9,33</i>



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt. 6 - Jakarta Pusat 10110**